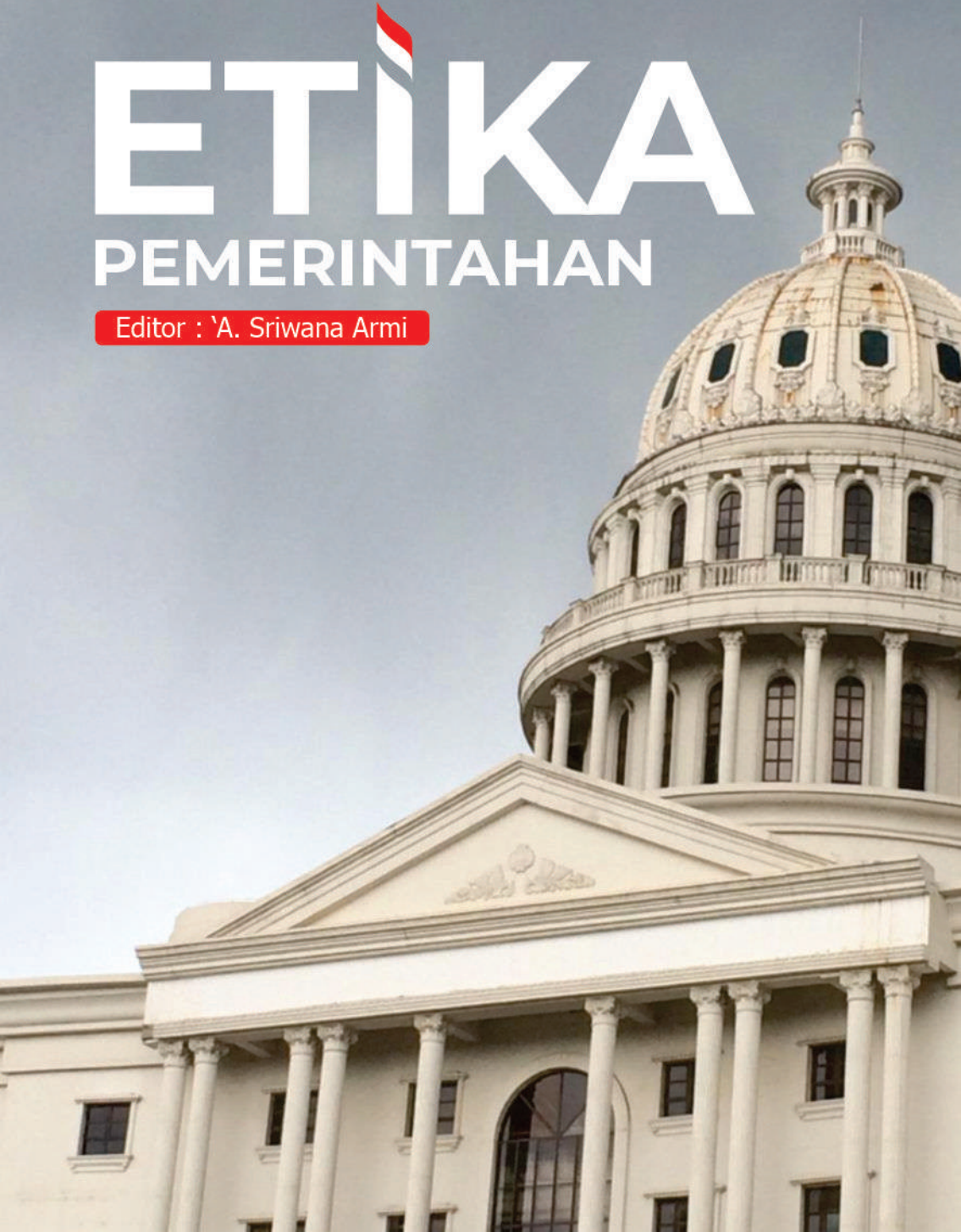


Salman, S.Sos., M.AP
Abd. Wahid, S.Sos., M.AP



ETIKA PEMERINTAHAN

Editor : 'A. Sriwana Armi



ETIKA

PEMERINTAHAN

Buku ini membahas peran penting etika dalam pemerintahan, yang menjadi landasan utama dalam menciptakan tata kelola yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Etika pemerintahan bukan sekadar aturan, tetapi juga pedoman moral yang membantu para pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme.

Dalam buku ini, dijelaskan berbagai prinsip dasar etika pemerintahan, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kode etik aparatur pemerintah. Selain itu, buku ini mengulas permasalahan etika dalam pemerintahan, termasuk korupsi, nepotisme, dan pelayanan publik yang tidak merata, serta memberikan contoh penerapan etika pemerintahan dalam konteks global.

Pembaca juga akan mendapatkan wawasan mengenai bagaimana membangun budaya etika dalam pemerintahan, peran teknologi dalam meningkatkan transparansi, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etika pemerintahan di masa depan. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, serta praktisi pemerintahan yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya etika dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.



✉ ganeshakreasisemesta@gmail.com

🌐 www.ganeshakreasisemesta.com

📞 0852 8000 2192

🔧 Anggota IKAPI No. 281/JTE/2024

ISBN 978-634-7126-79-5



9 786347 126795

ETIKA PEMERINTAHAN

Salman, S.Sos., M.AP
Abd. Wahid, S.Sos., M.AP



PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA

ETIKA PEMERINTAHAN

Penulis : Salman, S.Sos., M.AP
Abd. Wahid, S.Sos., M.AP

Editor : 'A. Sriwana Armi

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Uli Mas'uliyah Indarwati

ISBN : 978-634-7126-79-5

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA,**
FEBRUARI 2024
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 281/JTE/2024

Redaksi:

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden
Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192
Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Etika dalam pemerintahan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, kepercayaan publik, serta integritas lembaga-lembaga negara. Pemerintahan yang dijalankan tanpa landasan etika yang kuat dapat menimbulkan dampak negatif seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini tidak hanya merusak reputasi pemerintah, tetapi juga merugikan masyarakat, karena keputusan yang diambil dapat berpihak pada kepentingan pribadi, bukan untuk kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penting bagi setiap aparatur negara untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawabnya.

Etika pemerintahan bukan hanya sebuah aturan, melainkan suatu pedoman moral yang mengarahkan para pejabat publik untuk berperilaku adil, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan etika yang baik akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya, serta mampu mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dengan adanya etika yang diterapkan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan, diharapkan tercipta pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat, serta mampu menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya etika dalam pemerintahan, serta memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana etika seharusnya diterapkan dalam praktik pemerintahan. Diharapkan melalui buku ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar etika pemerintahan dan relevansinya dalam konteks pemerintahan masa kini. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para mahasiswa dalam menyusun kebijakan publik yang beretika, serta membentuk generasi pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi sumber pembelajaran akademis bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai referensi praktis bagi mereka yang tertarik untuk berkontribusi

dalam pembangunan pemerintahan yang lebih bersih dan adil. Dengan mempelajari dan menerapkan etika dalam pemerintahan, kita semua berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah.

Sinjai, 14 Januari 2025
Penulis

Salman, S.Sos., M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Definisi Etika	1
B. Peran Etika dalam Pemerintahan	5
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP DASAR ETIKA PEMERINTAHAN	21
A. Keadilan dalam Pemerintahan	21
B. Transparansi dan Akuntabilitas	25
C. Integritas dan Profesionalisme	29
BAB 3 KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH	34
A. Pengertian Kode Etik	34
B. Prinsip-Prinsip Kode Etik Aparatur Pemerintah.....	38
C. Sanksi Etis dan Disiplin	41
BAB 4 MASALAH ETIKA DALAM PEMERINTAHAN	46
A. Korupsi.....	46
B. Nepotisme dan Kolusi	50
C. Pelayanan Publik yang Tidak Merata	55
BAB 5 ETIKA PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS GLOBAL	61
A. Etika Pemerintahan di Negara Lain.....	61
B. Tantangan Etika dalam Globalisasi.....	65
BAB 6 MEMBANGUN ETIKA DALAM PEMERINTAHAN	71
A. Pendidikan Etika untuk Aparatur Pemerintah	71
B. Kebijakan Pemerintahan yang Beretika.....	74
C. Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan	78
BAB 7 STUDI KASUS ETIKA PEMERINTAHAN	83
A. Kasus Korupsi dalam Pemerintahan	83
B. Kasus Penyalahgunaan Wewenang	87
BAB 8 PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN ETIKA PEMERINTAHAN	92
A. Digitalisasi Pemerintahan dan Etika	92
B. Pengawasan Berbasis Teknologi.....	96

BAB 9	TANTANGAN DAN PERSPEKTIF ETIKA	
	PEMERINTAHAN KE DEPAN.....	101
	A. Tantangan Membangun Etika Pemerintahan.....	101
	B. Masa Depan Etika Pemerintahan.....	105
DAFTAR PUSTAKA		110
TENTANG PENULIS.....		113

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Definisi Etika

Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia. Etika memberikan pedoman bagi individu atau kelompok dalam membuat keputusan yang mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kebaikan (Sastra, 2015). Dalam konteks pemerintahan, etika berhubungan dengan prinsip-prinsip moral yang membimbing tindakan para pejabat publik, lembaga-lembaga pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Etika dalam pemerintahan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan (Jones, 2016).

Menurut Machiavelli (1532), etika pemerintahan adalah serangkaian nilai yang harus dipertahankan oleh penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, meskipun hal tersebut sering kali bertentangan dengan nilai moral umum. Namun, lebih lanjut dalam perkembangan teori etika pemerintahan, banyak ahli menyarankan agar etika dalam pemerintahan seharusnya melibatkan komitmen terhadap keadilan sosial dan pelayanan publik yang adil.

Ruang Lingkup Etika dalam Pemerintahan

Etika dalam pemerintahan mencakup berbagai aspek yang berhubungan langsung dengan moralitas dan integritas aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Ruang lingkup

etika pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa elemen penting yang saling terkait, di antaranya adalah etika aparatur pemerintah, pengambilan keputusan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pengawasan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup etika dalam pemerintahan:

1. Etika Aparatur Pemerintah

Etika aparatur pemerintah mencakup nilai-nilai moral yang harus diterapkan oleh setiap individu yang bekerja dalam pemerintahan. Aparatur negara harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Etika ini juga mencakup keharusan bagi aparatur untuk melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, serta bertindak dengan integritas.

Menurut **Purnama (2021)**, etika aparatur pemerintah sangat berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam hal ini, integritas menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi pemerintah, serta menjaga kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan.

2. Etika dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam pemerintahan harus didasarkan pada prinsip etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan umum. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tanpa mengutamakan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Mulyono (2022) menjelaskan bahwa keputusan pemerintah yang beretika adalah keputusan yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Keputusan tersebut harus diambil melalui proses yang

terbuka dan melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memastikan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

3. Etika dalam Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu area yang paling penting dalam konteks etika pemerintahan. Aparatur negara harus memberikan layanan yang adil, profesional, dan tanpa diskriminasi kepada seluruh masyarakat. Hal ini termasuk di dalamnya pemberian pelayanan yang tidak mengutamakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak-hak yang setara dalam pelayanan publik.

Haryanto (2023) menegaskan bahwa etika dalam pelayanan publik berkaitan langsung dengan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Jika pelayanan tidak memenuhi standar etika, akan timbul ketidakpercayaan yang dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

4. Etika dalam Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya

Etika dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya negara berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengelola dana publik dan sumber daya negara dengan cara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Etika ini mengharuskan pemerintah untuk tidak menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut **Prabowo (2020)**, pemerintah yang mengelola anggaran negara dengan etis akan mengurangi kemungkinan terjadinya pemborosan dan korupsi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa publik dapat memantau penggunaan dana tersebut.

5. Etika dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga etika pemerintahan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dapat diawasi oleh pihak yang berwenang, serta memenuhi standar hukum yang berlaku. Pengawasan yang transparan dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan tindakan tidak etis lainnya dalam pemerintahan.

Fatimah & Ardiansyah (2021) menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang independen dan efektif untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pemerintahan. Pengawasan berbasis teknologi, misalnya melalui e-government, juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

6. Etika dalam Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Hubungan yang etis antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan inklusif. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu, memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan kelompok tertentu. Keputusan yang transparan dan inklusif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan publik.

Iskandar & Bahri (2022) mengungkapkan bahwa hubungan yang etis antara pemerintah dan masyarakat dapat tercapai apabila ada komunikasi yang jelas, terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembuatan kebijakan.

7. Etika dalam Hubungan Internasional

Etika pemerintahan juga berperan dalam hubungan internasional, di mana negara harus menjaga moralitas dan integritas dalam berinteraksi dengan negara lain. Etika internasional mencakup perlunya menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan kerja sama yang saling menguntungkan

antara negara. Tindakan yang tidak etis dalam hubungan internasional, seperti manipulasi atau penindasan terhadap negara lain, dapat merusak citra negara tersebut di kancah global.

Sutrisno (2020) menjelaskan bahwa negara-negara di dunia harus mengedepankan nilai-nilai etika dalam hubungan internasional, termasuk menghindari tindakan yang merugikan negara lain dan mempromosikan keadilan global.

B. Peran Etika dalam Pemerintahan

Etika memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Dalam konteks pemerintahan, etika tidak hanya mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menciptakan dasar bagi seluruh sistem pemerintahan untuk beroperasi dengan prinsip-prinsip yang adil dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang didasari oleh etika yang baik akan lebih mampu melayani rakyat dengan adil, mencegah terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga integritas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.

Seperti yang dikemukakan oleh Rawls (1971), **keadilan sebagai fairness** harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan. Etika dalam pemerintahan menjamin bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok, tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, khususnya kelompok-kelompok yang paling rentan. Dalam hal ini, etika berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan menghindari dominasi oleh kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas.

1. Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan tantangan serius dalam pemerintahan yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang

berkelanjutan dan sistematis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beretika. Berikut adalah beberapa langkah dan prinsip yang dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang:

a. Pencegahan Melalui Pendidikan dan Kesadaran Etika

Pendidikan etika bagi aparatur pemerintah menjadi dasar penting dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Aparatur negara perlu memahami nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugasnya. Program pelatihan yang fokus pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam pelayanan publik.

Menurut **Sutrisno (2019)**, pendidikan etika yang intensif akan membantu membangun karakter aparatur yang tidak hanya kompeten tetapi juga jujur dalam menjalankan tugasnya.

b. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Sistem pengawasan internal yang kuat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kegiatan atau keputusan yang diambil dapat diawasi secara ketat oleh pihak yang berwenang, baik itu internal maupun eksternal. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan aksesibilitas informasi publik juga menjadi elemen penting dalam mengurangi kesempatan untuk penyimpangan.

Fatimah & Ardiansyah (2021) menyarankan agar teknologi seperti e-Government dapat diintegrasikan dalam sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Implementasi Kode Etik dan Peraturan Hukuman

Penerapan kode etik dalam pemerintahan adalah salah satu cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas. Aparatur yang melanggar kode etik harus menghadapi sanksi yang tegas dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010**, kode etik aparatur pemerintah mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Aparatur yang melanggar prinsip tersebut akan dikenakan sanksi yang sesuai.

d. Peningkatan Budaya Transparansi dan Partisipasi Publik

Budaya transparansi dalam pemerintahan sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mengumumkan laporan keuangan atau kebijakan publik secara terbuka. Hal ini dapat memperkuat pengawasan sosial dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Menurut **Prabowo (2020)**, partisipasi publik yang meningkat akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan akuntabel, sehingga mengurangi peluang untuk melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

e. Sistem Integrasi Teknologi dalam Pemerintahan

Teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sistem seperti sistem manajemen keuangan berbasis elektronik, audit berbasis data, dan mekanisme pelaporan pelanggaran berbasis digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik.

Menurut Nugroho & Sari (2022), teknologi dapat memberikan solusi dalam meningkatkan integritas aparatur, karena sistem digital yang terpercaya dapat mengurangi manipulasi dan penyalahgunaan data.

f. Pendekatan Regulasi dan Hukum yang Kuat

Penerapan hukum yang tegas dan adil menjadi salah satu cara untuk menanggulangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Regulasi yang mengatur secara khusus terkait korupsi seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya melalui UU No. 20 Tahun 2001 harus terus diperkuat dan ditegakkan dengan konsisten.

Sutrisno (2021) menekankan bahwa tanpa adanya regulasi hukum yang kuat, risiko penyimpangan akan terus meningkat, sehingga sistem pemerintahan menjadi rapuh dan rentan terhadap tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang memerlukan pendekatan yang holistik meliputi pendidikan, pengawasan, penguatan regulasi, dan penerapan teknologi yang transparan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kedua aspek ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan bahwa segala tindakan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak dalam pemerintahan.

a. Penerapan Sistem Informasi Terbuka (Open Government)

Transparansi dapat ditingkatkan dengan penerapan sistem informasi terbuka atau *open government* yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan, anggaran, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Penggunaan teknologi informasi, seperti e-Government, memungkinkan publik untuk mendapatkan akses langsung terhadap informasi yang mereka butuhkan, yang pada gilirannya membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengawasi secara langsung bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, sehingga lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap penyimpangan.

Menurut **Mulyono (2022)**, penggunaan teknologi informasi yang transparan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga mendukung sistem pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini akan memperkecil peluang korupsi karena segala bentuk kebijakan dan keputusan akan terpantau oleh publik secara langsung.

b. Pengelolaan Anggaran yang Terbuka

Salah satu area yang sering menjadi perhatian dalam konteks akuntabilitas adalah pengelolaan anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap alokasi dana untuk program atau kegiatan pemerintah harus diumumkan dan dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat. Pengelolaan anggaran yang terbuka memungkinkan publik untuk mengetahui dan memantau pengeluaran negara, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Prabowo (2020) mengungkapkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan. Laporan anggaran yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh publik memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dana untuk masing-masing program atau sektor. Ini akan meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dana negara.

c. Pengawasan Independen

Sistem pengawasan yang kuat dan independen adalah salah satu faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Lembaga-lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Ombudsman memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan yang ada. Pengawasan yang independen akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut **Fatimah & Ardiansyah (2021)**, pengawasan independen yang dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan otonomi penuh sangat penting untuk menjaga integritas pemerintahan. Selain itu, teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, misalnya dengan platform pelaporan pengaduan secara online yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintahan.

d. Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan

Transparansi tidak hanya mencakup akses terhadap informasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat akan menciptakan kebijakan yang

lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta harapan masyarakat. Ketika masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan, mereka tidak hanya diberi informasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik terhadap kebijakan yang akan diambil. Hal ini memperkaya perspektif pemerintah dan mengurangi kemungkinan adanya kebijakan yang tidak adil atau merugikan kelompok tertentu.

Sutrisno (2020) berpendapat bahwa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan sangat meningkatkan kualitas kebijakan dan juga memperkuat legitimasi keputusan yang diambil. Dengan partisipasi publik, masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar, yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

e. Laporan Keuangan dan Kinerja yang Transparan

Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah harus menyusun dan menyediakan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini tidak hanya mencakup laporan keuangan, tetapi juga laporan kinerja yang menggambarkan pencapaian program dan kebijakan yang telah dijalankan. Laporan tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh publik, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah berhasil mencapai tujuannya.

Menurut **Nugroho & Sari (2022)**, transparansi dalam laporan keuangan dan kinerja pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan. Dengan laporan yang transparan, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran telah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil efektif atau tidak.

f. Penguatan Kode Etik dan Sanksi Tegas

Pemerintah juga harus memperkuat penerapan kode etik yang mengatur perilaku aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik ini tidak hanya memberikan pedoman moral bagi aparatur pemerintah, tetapi juga mencakup sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar prinsip-prinsip etika pemerintahan. Sanksi yang jelas dan tegas akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Prabowo (2021) menekankan bahwa penerapan kode etik yang ketat dan penegakan sanksi yang adil akan meningkatkan integritas aparat pemerintah. Hal ini akan memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, pemerintah harus mengimplementasikan berbagai langkah strategis seperti penerapan sistem informasi terbuka, pengelolaan anggaran yang transparan, pengawasan independen, serta mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan dan kinerja yang transparan serta penguatan kode etik dan penegakan sanksi tegas sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

3. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah fondasi utama bagi terciptanya stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di sebuah negara. Tanpa adanya kepercayaan yang kuat, berbagai kebijakan dan program pemerintah sulit untuk dilaksanakan dengan efektif, dan akan terbentuk ketidakpastian serta kecurigaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dan

memelihara kepercayaan masyarakat melalui langkah-langkah yang dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek pemerintahan.

a. Transparansi sebagai Kunci Utama dalam Membangun Kepercayaan

Transparansi memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan keputusan pemerintah dapat diakses dengan mudah dan jelas, mereka akan merasa lebih percaya terhadap niat baik pemerintah. Pemerintah yang transparan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan dan siap untuk memberikan penjelasan mengenai setiap kebijakan yang mereka buat.

Menurut **Nugroho & Sari (2022)**, transparansi yang konsisten dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran dapat mengurangi keraguan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Proses ini mengubah persepsi publik, yang sebelumnya mungkin merasa pemerintah tidak dapat dipercaya, menjadi lebih terbuka dan mendukung.

b. Menerapkan Akuntabilitas dalam Setiap Keputusan Pemerintah

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas tentang kebijakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat, maka masyarakat akan merasa bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka. Akuntabilitas ini tidak hanya terbatas pada keuangan, tetapi juga pada keputusan kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai dari program-program yang telah dijalankan.

Prabowo (2020) mengungkapkan bahwa akuntabilitas adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berbasis pada kepentingan politik atau kelompok tertentu, tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan, pemerintah dapat membangun kepercayaan lebih dalam di mata publik.

c. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Memihak

Salah satu aspek penting yang mendukung terciptanya kepercayaan publik adalah adanya penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak memihak. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, masyarakat akan merasa bahwa semua pihak, termasuk aparat pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan rasa keadilan yang penting bagi terciptanya kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Fatimah & Ardiansyah (2021) menekankan bahwa sistem peradilan yang adil dan terbuka memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hukum yang ditegakkan tanpa diskriminasi menciptakan keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan hukum, termasuk aparat pemerintah itu sendiri.

d. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan

Pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Ketika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan, mereka merasa dihargai dan diakui peran serta mereka dalam pembangunan negara. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan dan program pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan.

Menurut **Sutrisno (2020)**, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan bukan hanya soal memberikan hak suara, tetapi juga soal mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar, mereka akan lebih mendukung kebijakan yang dihasilkan.

e. Tindakan Tegas Terhadap Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dan korupsi merupakan masalah utama yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat aparat pemerintahan terlibat dalam tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang, kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintah akan menurun drastis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tanpa adanya kompromi.

Widodo (2023) menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan memberikan pesan kuat bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Pemerintah yang mampu menunjukkan bahwa mereka berani bertindak terhadap pelanggaran akan lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Edukasi Etika Pemerintahan

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan tentang etika pemerintahan juga sangat penting dalam membangun kepercayaan. Ketika masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, mereka akan lebih mudah untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Edukasi mengenai etika pemerintahan akan meningkatkan pemahaman publik

tentang hak dan kewajiban mereka serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Mulyono (2022) menjelaskan bahwa dengan meningkatkan literasi masyarakat mengenai etika pemerintahan, masyarakat akan lebih kritis dan terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Ini juga mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum yang adil, partisipasi publik, serta tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih besar di mata masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang melibatkan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terpercaya dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

4. Menjaga Tanggung Jawab Sosial Pemerintah

Tanggung jawab sosial pemerintah adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Hal ini mencakup perhatian terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat terlindungi. Menjaga tanggung jawab sosial pemerintah sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab.

a. Membangun Kebijakan Sosial yang Inklusif

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur atau perekonomian, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, termasuk penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kebijakan sosial yang inklusif adalah kebijakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Menurut **Prabowo (2020)**, kebijakan sosial yang inklusif memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang tanpa terkendala oleh status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Kebijakan ini memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan tetap mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bertanggung Jawab

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang bijaksana adalah salah satu aspek penting dalam menjaga tanggung jawab sosial pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa SDA yang dimiliki negara dimanfaatkan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kebijakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan juga berperan dalam mencegah kerusakan alam yang dapat mengancam kehidupan masyarakat.

Mulyono (2022) menegaskan bahwa pengelolaan SDA yang bertanggung jawab akan memberikan kesejahteraan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan SDA, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan masa depan lingkungan.

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tanggung jawab sosial pemerintah juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh rakyat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak dasar individu, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, pemerintah harus menciptakan mekanisme yang melibatkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM dan menyediakan akses untuk mendapatkan keadilan.

Menurut **Fatimah & Ardiansyah (2021)**, perlindungan HAM merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai apakah pemerintah memenuhi tanggung jawab sosialnya atau tidak. Negara yang menghormati HAM akan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat, karena mereka merasa dihargai dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah harus bertanggung jawab untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan lapangan kerja. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya membantu mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sutrisno (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pemberian pelatihan, dukungan modal, dan akses pasar yang adil akan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah juga perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang rentan terhadap ketidaksetaraan ekonomi.

e. Menjaga Keadilan Sosial

Pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup penghapusan

ketidaksetaraan ekonomi dan sosial melalui kebijakan yang memperhatikan redistribusi sumber daya, penyediaan layanan publik yang berkualitas, serta peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Widodo (2023) menyatakan bahwa menjaga keadilan sosial merupakan elemen kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ketidaksetaraan sosial yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengarah pada ketegangan sosial dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan yang adil sangat penting untuk menjaga kesejahteraan sosial.

f. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan saluran yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Nugroho & Sari (2022) mengungkapkan bahwa partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan akan menciptakan rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, mereka akan lebih mendukung kebijakan tersebut dan lebih percaya terhadap pemerintah yang menerapkannya.

g. Tanggung Jawab Sosial dalam Krisis dan Bencana

Pada saat terjadinya krisis atau bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi warga negara dari dampak buruk yang ditimbulkan. Pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan

rehabilitasi, serta memastikan pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Sutrisno (2020) menyatakan bahwa dalam situasi bencana, pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan dan memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan adil dan efisien. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencakup kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Menjaga tanggung jawab sosial pemerintah adalah tanggung jawab yang besar dan mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat. Dari kebijakan sosial yang inklusif hingga pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang bertanggung jawab sosial akan menciptakan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas dan kemajuan negara.

Secara keseluruhan, etika memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Tanpa etika yang kuat, pemerintahan akan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan, yang akhirnya akan merugikan masyarakat. Etika bukan hanya menjadi pedoman bagi individu dalam pemerintahan, tetapi juga merupakan fondasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang dapat dipercaya, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP DASAR ETIKA PEMERINTAHAN

A. Keadilan dalam Pemerintahan

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam etika pemerintahan, terutama dalam pembuatan kebijakan publik. Prinsip keadilan dalam pemerintahan mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, status sosial, atau faktor lainnya. Dalam pembuatan kebijakan publik, keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah memberikan manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang paling membutuhkan.

1. Pengertian Keadilan dalam Pemerintahan

Keadilan dalam pemerintahan dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan perlakuan yang setara bagi setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, serta mengatur distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya terbatas pada pembagian yang sama, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak dasar setiap individu.

Menurut **Rawls (1971)**, keadilan adalah suatu konsep yang terdiri dari dua komponen utama:

- a. **Prinsip Keadilan sebagai Fairness**, yang menuntut agar kebijakan publik dirancang dengan cara yang memungkinkan setiap individu memiliki kesempatan

yang sama untuk berkembang, meskipun dengan kondisi sosial yang berbeda.

- b. **Perbedaan yang Adil**, yang mengizinkan ketimpangan sosial dan ekonomi jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling dirugikan dalam masyarakat.

2. Keadilan dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Prinsip keadilan harus menjadi pedoman dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak adil, tetapi justru memprioritaskan kepentingan umum dan keberlanjutan sosial. Pembuatan kebijakan yang adil membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap:

- a. **Distribusi Sumber Daya**: Kebijakan yang adil harus mempertimbangkan distribusi sumber daya yang merata, terutama untuk mereka yang berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang lebih lemah. Kebijakan fiskal, misalnya, harus dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan akses bagi kelompok yang kurang mampu (Sen, 1999).
- b. **Akses yang Setara**: Kebijakan pemerintah juga harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kebijakan pendidikan yang berkeadilan, misalnya, akan memberikan peluang yang sama bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka (Jones, 2016).
- c. **Pemenuhan Kebutuhan Dasar**: Kebijakan publik yang adil juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perlindungan sosial bagi kelompok miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang berada dalam situasi rentan. Kebijakan distribusi pangan, bantuan sosial, dan program pengentasan kemiskinan adalah contoh kebijakan yang harus dirancang dengan

prinsip keadilan untuk menjamin kesejahteraan rakyat yang adil.

3. Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan dalam Pemerintahan

Meskipun prinsip keadilan sangat penting dalam pemerintahan, penerapannya dalam kebijakan publik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mewujudkan keadilan dalam pemerintahan antara lain:

- a. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi:** Salah satu tantangan terbesar dalam pembuatan kebijakan yang adil adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Ketimpangan ini dapat menghalangi implementasi kebijakan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, karena sebagian kelompok mungkin tidak memiliki sumber daya atau kesempatan yang sama untuk mengakses layanan publik.
- b. Pengaruh Kepentingan Politik:** Kepentingan politik sering kali mempengaruhi pembuatan kebijakan, dengan beberapa kelompok berusaha mengatur kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, bukan demi kepentingan umum. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak adil, yang lebih menguntungkan kelompok elit daripada masyarakat pada umumnya (Machiavelli, 1532).
- c. Birokrasi yang Inefektif:** Birokrasi yang tidak efisien atau korup dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik yang adil. Misalnya, jika bantuan sosial atau program pemerintahan tidak didistribusikan secara tepat sasaran, maka mereka yang membutuhkan justru tidak menerima manfaat yang seharusnya mereka terima.

4. Contoh Penerapan Keadilan dalam Kebijakan Pemerintahan

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa contoh penerapan prinsip keadilan dalam kebijakan pemerintahan:

- a. **Kebijakan Kesehatan Universal:** Banyak negara yang menerapkan sistem kesehatan universal untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Negara-negara Skandinavia, misalnya, mengutamakan keadilan dalam penyediaan layanan kesehatan kepada seluruh warganya (Osborne & Gaebler, 1992).
- b. **Kebijakan Pendidikan Inklusif:** Beberapa negara mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif, di mana anak-anak dari latar belakang sosial yang berbeda diberikan akses yang setara terhadap pendidikan yang bermutu. Di Indonesia, upaya untuk mendistribusikan dana pendidikan yang lebih merata di daerah-daerah terpencil merupakan salah satu contoh kebijakan yang didasarkan pada prinsip keadilan.
- c. **Kebijakan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi:** Program-program pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial langsung tunai (BLT), bantuan pangan non-tunai, dan subsidi perumahan adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar mereka.

Prinsip keadilan dalam pemerintahan merupakan landasan bagi terciptanya kebijakan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Meskipun penerapannya tidak selalu mudah dan menghadapi berbagai tantangan, keadilan dalam pembuatan kebijakan publik adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Pemerintah yang menjunjung tinggi keadilan akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan sejahtera.

B. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan **akuntabilitas** adalah dua prinsip fundamental dalam pemerintahan yang baik dan bersih. Keduanya memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

1. **Transparansi** dalam pemerintahan mengacu pada keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat, agar setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dipahami oleh publik. Transparansi bertujuan untuk menghindari penyelewengan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas**, di sisi lain, mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil, baik kepada publik maupun lembaga-lembaga yang berwenang. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan hasil dari kebijakan yang diterapkan.

Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Pemerintahan

Penerapan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan berarti bahwa informasi terkait dengan kebijakan, anggaran, proses pengambilan keputusan, dan hasil dari kebijakan harus dapat diakses dengan mudah oleh publik. Beberapa cara penerapan transparansi dalam pemerintahan antara lain:

1. **Publikasi Anggaran dan Belanja Negara:** Pemerintah harus secara terbuka mempublikasikan anggaran dan laporan belanja negara kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara adil dan efisien. Dalam hal ini, **akses terhadap anggaran negara dan pelaporan keuangan publik** menjadi penting untuk menjaga transparansi pengelolaan sumber daya publik (Kaufmann, 2021).

2. **Penyediaan Informasi Kebijakan:** Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus diumumkan kepada publik melalui saluran yang mudah diakses, seperti situs web pemerintah, media massa, atau melalui pertemuan publik. Penyediaan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami alasan di balik suatu kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka.
3. **Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan:** Transparansi dalam pemerintahan juga mengharuskan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau referendum. Dengan demikian, kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan masyarakat juga merasa dilibatkan dalam proses demokrasi (Tavits, 2020).
4. **Pengawasan Independen:** Untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan transparan, dibutuhkan lembaga pengawas yang independen, seperti badan audit atau lembaga anti-korupsi, yang dapat mengevaluasi kinerja pemerintah secara objektif.

Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pemerintahan

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas meliputi beberapa aspek berikut:

1. **Pelaporan Kinerja:** Setiap lembaga pemerintahan harus memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada publik, termasuk pencapaian, kendala, dan penggunaan sumber daya. Laporan kinerja ini harus mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan (Bauhr & Grimes, 2017).
2. **Penyelidikan dan Audit:** Akuntabilitas memerlukan adanya mekanisme audit dan penyelidikan yang transparan untuk menilai apakah kebijakan dan penggunaan anggaran sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia, misalnya, berperan penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuannya dan menghindari penyalahgunaan anggaran.

3. **Pertanggungjawaban Publik:** Setiap pejabat pemerintah harus dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik keputusan dan kebijakan yang diambil. Mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pengawas yang ada.
4. **Sanksi untuk Penyalahgunaan Kekuasaan:** Akuntabilitas juga mengharuskan adanya sanksi yang tegas terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya atau melakukan tindakan korupsi. Tanpa adanya mekanisme sanksi yang jelas, akuntabilitas tidak dapat ditegakkan secara efektif (Dimitrov et al., 2019).

Hubungan antara Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas saling terkait erat dan keduanya diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Tanpa transparansi, masyarakat tidak akan memiliki informasi yang cukup untuk menilai apakah pemerintah bertindak dengan benar atau tidak. Sebaliknya, tanpa akuntabilitas, meskipun informasi tersedia, pemerintah tidak akan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Pemerintah yang transparan dapat menunjukkan kepada publik bagaimana keputusan-keputusan diambil, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Kedua prinsip ini bekerja bersama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tantangan dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas

Walaupun transparansi dan akuntabilitas sangat penting, penerapannya dalam pemerintahan sering kali menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- 1. Birokrasi yang Rumit dan Tidak Efisien:** Proses administrasi yang rumit dapat menghalangi penerapan transparansi dan akuntabilitas, karena warga negara sulit mengakses informasi yang mereka butuhkan atau memahami prosedur yang berlaku.
- 2. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan:** Praktik korupsi sering kali menghalangi penerapan transparansi dan akuntabilitas. Pejabat yang terlibat dalam korupsi cenderung menutupi informasi dan menghindari pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
- 3. Keterbatasan Teknologi:** Meskipun teknologi dapat meningkatkan transparansi melalui platform online dan media sosial, tidak semua pemerintah memiliki akses atau kemampuan untuk memanfaatkan teknologi ini secara maksimal.

Contoh Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas

- 1. Kebijakan e-Government:** Banyak negara yang telah mengimplementasikan **e-government** untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. E-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik secara online, memantau kinerja pemerintah, serta memberikan umpan balik secara langsung kepada pemerintah.
- 2. Kebijakan Anti-Korupsi:** Pemerintah yang transparan dan akuntabel juga harus memiliki kebijakan anti-korupsi yang tegas. Negara-negara yang menerapkan kebijakan anti-korupsi yang kuat, seperti melalui lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia, dapat memberikan contoh nyata bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat bekerja bersama untuk memberantas korupsi.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kedua prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

C. Integritas dan Profesionalisme

Integritas dalam konteks pemerintahan merujuk pada konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Integritas merupakan pondasi penting bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pejabat publik yang memiliki integritas akan berkomitmen untuk melakukan tugasnya secara jujur, transparan, dan adil, serta selalu menjaga moralitas dalam setiap keputusan yang diambil.

Beberapa aspek utama dalam integritas meliputi:

1. **Kejujuran:** Kejujuran dalam membuat keputusan dan mengelola sumber daya publik sangat penting. Pejabat publik yang jujur tidak akan terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
2. **Keadilan:** Menjaga keadilan dalam pemberian layanan publik tanpa memihak pada individu atau kelompok tertentu.
3. **Kepatuhan pada Hukum:** Pejabat publik yang berintegritas akan selalu mematuhi hukum yang berlaku dan bertindak dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan.

Pengertian Profesionalisme dalam Pemerintahan

Profesionalisme dalam pemerintahan adalah kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh aparatur negara untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Profesionalisme berfokus pada penguasaan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar tinggi dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Beberapa aspek yang membentuk profesionalisme aparatur pemerintah adalah:

1. **Kompetensi:** Aparatur pemerintah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif.
2. **Etika Kerja:** Etika kerja yang baik mencakup disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan, serta memastikan pelayanan publik yang diberikan berkualitas.
3. **Pengembangan Karir:** Aparatur pemerintahan perlu terus mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan agar tetap relevan dengan perkembangan dunia pemerintahan dan pelayanan publik.

Pentingnya Integritas dan Profesionalisme dalam Pemerintahan

Integritas dan profesionalisme sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Tanpa kedua aspek ini, pemerintahan berisiko menghadapi masalah seperti **korupsi**, **nepotisme**, dan **penyalahgunaan wewenang**, yang dapat merusak kepercayaan publik. Pemerintahan yang tidak profesional akan kesulitan dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat.

Integritas dan profesionalisme memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek berikut:

1. **Pelayanan Publik yang Efektif:** Aparatur yang berintegritas dan profesional akan lebih mampu memberikan pelayanan publik yang tepat, responsif, dan adil kepada masyarakat.
2. **Kepercayaan Publik:** Pemerintah yang memiliki aparatur dengan integritas dan profesionalisme akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan.

- 3. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang:** Integritas dan profesionalisme dapat menjadi benteng terhadap praktik penyalahgunaan wewenang, karena aparaturnya yang memiliki kedua nilai tersebut akan lebih tahan terhadap godaan dan tekanan yang bertentangan dengan etika dan hukum.

Tantangan dalam Menjaga Integritas dan Profesionalisme

Meskipun integritas dan profesionalisme sangat penting, menjaga kedua nilai ini dalam pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam upaya menjaga integritas dan profesionalisme di antaranya adalah:

- 1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan:** Korupsi menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas pemerintahan. Integritas dapat terganggu oleh tawaran-tawaran tidak sah atau penyalahgunaan kekuasaan.
- 2. Birokrasi yang Tidak Efisien:** Birokrasi yang rumit dan tidak efisien dapat menghambat upaya meningkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintahan. Sistem yang tidak transparan atau terlalu birokratis dapat menyebabkan proses pelayanan publik menjadi lambat atau tidak sesuai dengan standar profesional.
- 3. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Karir:** Aparaturnya pemerintah yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai atau tidak memiliki peluang untuk mengembangkan karirnya akan kesulitan dalam menjaga profesionalisme. Kurangnya pelatihan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip kerja yang baik dan mengurangi kemampuan untuk menghadapi tantangan baru dalam pemerintahan.

Strategi untuk Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme

Untuk memastikan integritas dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan, berbagai strategi dapat diterapkan, antara lain:

1. **Pendidikan dan Pelatihan:** Program pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga penguatan nilai-nilai etika dan integritas dalam bekerja.
2. **Pengawasan Internal dan Eksternal:** Pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga agar para pejabat pemerintah tetap berintegritas dan profesional. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal, seperti komisi anti-korupsi dan badan audit negara.
3. **Sistem Penghargaan dan Sanksi:** Pemerintah harus memiliki sistem penghargaan untuk aparatur yang menunjukkan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Di sisi lain, sistem sanksi yang tegas perlu diterapkan terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
4. **Penerapan Teknologi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik:** Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempermudah pengawasan. Sistem e-government, misalnya, dapat membantu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi.

Contoh Penerapan Integritas dan Profesionalisme dalam Pemerintahan

1. **Kebijakan Anti-Korupsi:** Pemerintah yang serius dalam menjaga integritas akan mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang kuat. Sebagai contoh, di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam menegakkan integritas dan memberantas korupsi.
2. **Pengembangan Profesionalisme Aparatur:** Banyak negara yang menerapkan sistem **performance-based evaluation**, di mana aparatur pemerintahan dievaluasi berdasarkan kinerja mereka, bukan hanya berdasarkan masa kerja. Sistem ini

mendorong peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik.

- 3. Transparansi dalam Proses Rekrutmen:** Pemerintah yang berintegritas dan profesional juga akan memastikan bahwa proses rekrutmen pegawai negeri dilakukan secara transparan dan objektif, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan dapat dipercaya.

Integritas dan profesionalisme adalah dua pilar penting yang harus dijaga oleh aparaturnya pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat dipercaya. Tantangan besar dalam menjaga kedua nilai ini memerlukan upaya yang konsisten melalui pendidikan, pengawasan, dan penerapan kebijakan yang mendukung. Hanya dengan menjaga integritas dan profesionalisme, pemerintahan dapat memastikan pelayanan yang berkualitas dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

BAB

3

KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH

A. Pengertian Kode Etik

Kode etik dalam pemerintahan adalah sekumpulan pedoman atau prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ini berfungsi untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah bertindak sesuai dengan standar moral dan profesionalisme yang tinggi, menjaga integritas, dan berfokus pada kepentingan publik. Menurut Sutrisno (2020), kode etik dalam pemerintahan mencakup prinsip dasar yang menjadi acuan bagi setiap aparatur negara dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku.

Kode etik sering kali berisi nilai-nilai dasar, seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan pada hukum, dan tanggung jawab sosial. Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai alat untuk memandu pegawai pemerintah dalam menghadapi situasi etis yang kompleks (Wardhani, 2021).

1. Tujuan Kode Etik dalam Pemerintahan

Kode etik memiliki beberapa tujuan penting dalam konteks pemerintahan, antara lain:

- a. **Menjaga Integritas Aparatur Pemerintahan:** Kode etik membantu memastikan bahwa pejabat pemerintah dan pegawai negara menjalankan tugas mereka dengan integritas, tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, atau

nepotisme. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sutrisno, 2020).

- b. Meningkatkan Profesionalisme:** Kode etik memberikan pedoman bagi aparatur pemerintah untuk bertindak secara profesional, dengan menghormati nilai-nilai etika yang berlaku dalam profesi mereka. Hal ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang mereka berikan (Lembaga Administrasi Negara [LAN], 2019).
- c. Menjaga Keadilan:** Kode etik membantu menciptakan pemerintahan yang adil, di mana setiap individu diperlakukan dengan setara, tanpa diskriminasi. Dalam kode etik ini, keadilan dalam pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan publik menjadi prioritas (Sutrisno, 2020).
- d. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan:** Kode etik berfungsi sebagai pengawasan internal bagi para pejabat publik untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Ini penting untuk menghindari tindakan yang merugikan negara dan masyarakat (Wardhani, 2021).
- e. Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat:** Dengan memiliki kode etik yang jelas, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan akuntabel, yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (LAN, 2019).

2. Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Pemerintahan

Beberapa prinsip utama yang umumnya terdapat dalam kode etik pemerintahan antara lain:

- a. Kejujuran:** Aparatur pemerintah harus selalu bersikap jujur dalam setiap tindakan, komunikasi, dan laporan kepada publik dan atasan (Sutrisno, 2020).
- b. Tanggung Jawab:** Setiap pegawai pemerintahan harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan kinerjanya. Mereka harus siap memberikan penjelasan

atau pertanggungjawaban terkait tindakan yang mereka lakukan (LAN, 2019).

- c. **Keadilan:** Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil harus berdasarkan prinsip keadilan, tanpa memihak atau mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu (Wardhani, 2021).
- d. **Kepatuhan pada Hukum:** Aparatur pemerintah harus senantiasa mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik (Sutrisno, 2020).
- e. **Kerahasiaan:** Kode etik juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang berhubungan dengan negara dan masyarakat, yang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (LAN, 2019).

3. Penyusunan dan Implementasi Kode Etik dalam Pemerintahan

Penyusunan kode etik biasanya melibatkan pemangku kepentingan dalam pemerintahan, termasuk badan pengawas, legislator, dan ahli hukum. Kode etik harus disusun dengan jelas, mudah dipahami, dan mencakup berbagai situasi yang mungkin dihadapi oleh aparatur pemerintah (Wardhani, 2021).

Untuk memastikan implementasi kode etik berjalan dengan baik, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. **Sosialisasi dan Pelatihan:** Aparatur pemerintah perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kode etik melalui sosialisasi dan pelatihan yang terus-menerus (Sutrisno, 2020).
- b. **Pengawasan dan Penegakan:** Kode etik harus diawasi dengan ketat oleh lembaga pengawas internal dan eksternal. Selain itu, harus ada sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar kode etik tersebut (LAN, 2019).
- c. **Evaluasi Berkala:** Kode etik harus dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan dan situasi sosial politik yang ada. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa kode etik tetap relevan

dan efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional (Sutrisno, 2020).

4. Tantangan dalam Implementasi Kode Etik

Implementasi kode etik dalam pemerintahan menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- a. **Kurangnya Pengawasan Efektif:** Tanpa pengawasan yang memadai, kode etik dapat dengan mudah diabaikan, yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (Wardhani, 2021).
- b. **Resistensi terhadap Perubahan:** Beberapa pegawai pemerintah mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan menentang perubahan yang dilakukan melalui penerapan kode etik, terutama jika mereka merasa bahwa hal tersebut akan membatasi kebebasan mereka dalam bekerja (LAN, 2019).
- c. **Korupsi dan Nepotisme:** Di banyak negara, korupsi dan nepotisme masih menjadi masalah besar, yang seringkali membuat penerapan kode etik menjadi tidak efektif. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan (Sutrisno, 2020).

5. Studi Kasus: Penerapan Kode Etik di Indonesia

Di Indonesia, kode etik untuk aparatur pemerintah telah diterapkan di berbagai lembaga pemerintah, termasuk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai contoh, **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** memiliki kode etik yang jelas untuk mencegah tindak pidana korupsi di kalangan pegawainya. Kode etik ini mengatur mengenai perilaku, integritas, dan tanggung jawab pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya (Wardhani, 2021).

Selain itu, **Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan** yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah menjalankan tugas sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan, serta meminimalisir

potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara (LAN, 2019).

B. Prinsip-Prinsip Kode Etik Aparatur Pemerintah

Kode etik aparatur pemerintahan adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan setiap pegawai negeri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Prinsip-prinsip dalam kode etik bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, memastikan integritas pegawai pemerintah, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Beberapa prinsip utama yang tercantum dalam kode etik aparatur pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme

Profesionalisme mengharuskan pegawai pemerintahan untuk melaksanakan tugas dengan keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Profesionalisme juga mengharuskan pegawai pemerintah untuk senantiasa mengembangkan diri dalam bidang pekerjaan mereka dan menjaga kualitas layanan publik. Seperti yang tercantum dalam **Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011**, pegawai pemerintah harus melaksanakan tugas secara profesional dengan berorientasi pada pelayanan yang prima, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kejujuran dan Integritas

Kejujuran dan integritas adalah landasan utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Aparatur negara harus bertindak dengan penuh kejujuran, tidak terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN* menekankan pentingnya integritas dalam setiap tindakan pegawai negara.

3. Keadilan

Prinsip keadilan dalam kode etik aparatur pemerintahan mengharuskan pegawai pemerintah untuk memberikan pelayanan yang setara kepada semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan harus mengedepankan asas keadilan, memberikan perlakuan yang adil terhadap setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Keadilan ini juga berhubungan dengan pemerataan akses terhadap layanan publik yang berkualitas (Sutrisno, 2020).

4. Tanggung Jawab

Setiap aparatur pemerintah harus bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambil. Tanggung jawab ini mencakup dua hal, yaitu tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab hukum terhadap negara. Setiap pegawai pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga penggunaan anggaran negara secara transparan dan efisien. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** mengatur tentang kedisiplinan pegawai negeri, termasuk kewajiban mereka untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.

5. Kepatuhan pada Hukum

Prinsip ini mengharuskan pegawai pemerintah untuk selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari penyimpangan atau pelanggaran hukum. Kepatuhan pada hukum juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan tugasnya secara sah dan adil. Prinsip ini tercermin dalam berbagai peraturan, seperti **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur kewajiban setiap pegawai untuk taat pada peraturan yang berlaku.

6. Keterbukaan dan Transparansi

Keterbukaan dan transparansi mengharuskan pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh publik terkait dengan kebijakan dan keputusan yang diambil. Transparansi ini bertujuan untuk menghindari praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Aparatur negara harus berkomunikasi secara terbuka mengenai hal-hal yang relevan dengan kepentingan publik, sesuai dengan **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008** tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.

7. Kepedulian terhadap Kepentingan Publik

Prinsip ini menekankan bahwa setiap pegawai pemerintah harus memiliki rasa peduli terhadap kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik. Kepedulian ini termasuk memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan efektif, serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap keputusan yang diambil (Sutrisno, 2020).

8. Kerahasiaan dan Keamanan Informasi

Penting bagi pegawai pemerintah untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif, baik yang terkait dengan kebijakan pemerintah, data pribadi masyarakat, maupun informasi yang dapat merugikan negara. Tugas pemerintah adalah melindungi informasi yang sangat penting untuk menjaga keamanan negara dan privasi individu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang *Keterbukaan Informasi Publik* dan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

9. Tidak Memihak dan Tidak Diskriminatif

Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintahan yang tidak memihak kepada kelompok tertentu. Pegawai pemerintah harus bebas dari segala bentuk diskriminasi

berdasarkan agama, suku, ras, golongan, atau status sosial. Mereka harus bertindak objektif dan profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa membedakan atau mengutamakan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

10. Kerjasama dan Sinergi

Prinsip ini mengharuskan adanya kerjasama yang baik antara sesama aparatur pemerintah dan antara pemerintah dengan masyarakat. Sinergi yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama yang baik dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Sanksi Etis dan Disiplin

Sanksi etis dan disiplin diberikan kepada aparatur pemerintah yang melanggar kode etik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini berfungsi untuk menjaga integritas, keadilan, dan kualitas pelayanan publik serta memastikan bahwa pegawai pemerintah bertindak sesuai dengan norma, prinsip, dan aturan yang berlaku. Sanksi ini dibedakan menjadi dua jenis: **sanksi etis** dan **sanksi disiplin**.

1. Sanksi Etis

Sanksi etis diberikan apabila aparatur pemerintah melanggar norma-norma moral yang tercantum dalam kode etik. Sanksi ini lebih berfokus pada tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika, seperti kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Beberapa contoh sanksi etis antara lain:

- a. **Peringatan Tertulis:** Sebagai bentuk teguran awal, peringatan tertulis diberikan kepada pegawai yang melanggar kode etik tanpa adanya pelanggaran berat. Peringatan ini biasanya digunakan untuk memberikan

kesempatan bagi pegawai untuk memperbaiki perilaku mereka.

- b. **Pengurangan Tanggung Jawab:** Jika pelanggaran kode etik cukup signifikan namun tidak cukup berat untuk dikenakan sanksi disiplin, pengurangan tanggung jawab dalam pekerjaan dapat diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa harus menghilangkan kesempatan bagi pegawai untuk memperbaiki diri.
- c. **Pencabutan Penghargaan:** Jika pegawai telah menerima penghargaan atau pengakuan atas kinerjanya, namun kemudian melanggar kode etik, penghargaan tersebut bisa dicabut sebagai bentuk sanksi moral yang menegaskan bahwa prestasi tidak bisa mengesampingkan etika.
- d. **Penurunan Pangkat atau Jabatan:** Dalam kasus pelanggaran kode etik yang cukup berat, namun tidak memenuhi syarat untuk pemecatan, penurunan pangkat atau jabatan dapat dilakukan. Penurunan ini menjadi sanksi yang menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap pegawai yang bersangkutan.

2. Sanksi Disiplin

Sanksi disiplin adalah tindakan yang diambil untuk menegakkan ketertiban dalam pemerintahan, terutama terkait dengan pelanggaran terhadap aturan yang lebih tegas, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau kewajiban profesional dalam menjalankan tugas. Sanksi disiplin diberikan melalui prosedur yang lebih formal dan dapat berujung pada pengurangan hak-hak pegawai pemerintah. Beberapa bentuk sanksi disiplin antara lain:

- a. **Peringatan Lisan atau Tertulis:** Peringatan lisan atau tertulis dapat diberikan sebagai tindakan pertama untuk pelanggaran ringan, seperti keterlambatan, kelalaian dalam tugas, atau pelanggaran minor lainnya. Ini bertujuan untuk memperingatkan pegawai agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

- b. **Penundaan Kenaikan Pangkat:** Salah satu bentuk sanksi disiplin adalah penundaan kenaikan pangkat, yang berarti pegawai tidak dapat naik pangkat sesuai dengan yang telah direncanakan. Sanksi ini berlaku bagi pegawai yang tidak menunjukkan kinerja atau perilaku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. **Pemindahan atau Penempatan pada Posisi Lain:** Pemindahan atau rotasi jabatan dilakukan sebagai bentuk sanksi disiplin untuk pegawai yang telah melakukan pelanggaran berat namun belum cukup untuk dipecat. Pemindahan ini bertujuan untuk memberi pelajaran serta kesempatan untuk memperbaiki diri dalam lingkungan kerja yang berbeda.
- d. **Pemecatan:** Pemecatan adalah sanksi disiplin yang paling berat dan biasanya diberikan sebagai akibat dari pelanggaran kode etik yang sangat serius, seperti terlibat dalam tindakan korupsi, penyuapan, atau perilaku yang merugikan negara. Pemecatan ini dilakukan berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, yang mengatur tentang berbagai pelanggaran yang dapat menyebabkan pemecatan seorang pegawai.

3. Proses Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi baik etis maupun disiplin harus mengikuti prosedur yang jelas dan adil. Proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu:

- a. **Pengumpulan Fakta dan Bukti:** Sebelum menjatuhkan sanksi, pengumpulan fakta dan bukti merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Tim pengawas atau badan terkait perlu melakukan investigasi untuk memastikan adanya pelanggaran yang terjadi.
- b. **Penyelidikan:** Setelah fakta dan bukti dikumpulkan, dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut memenuhi kriteria untuk dikenakan sanksi. Proses ini harus transparan dan melibatkan pihak yang berkompeten.

- c. **Sidang atau Pemeriksaan:** Beberapa kasus pelanggaran berat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim disiplin atau sidang etik. Pada tahap ini, pegawai yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan atas tindakannya.
- d. **Keputusan dan Penjatuhan Sanksi:** Berdasarkan hasil penyelidikan dan sidang, keputusan akhir tentang sanksi yang akan dijatuhkan dibuat. Keputusan ini harus adil dan berdasarkan bukti yang ada, serta mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang terjadi.

4. Peraturan yang Mengatur Sanksi

- a. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN* menegaskan pentingnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik di sektor pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil* mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi disiplin, mulai dari pelanggaran ringan hingga pemecatan.
- c. **Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011** tentang *Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN)* juga memberikan panduan mengenai jenis-jenis pelanggaran etis dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menegakkan kode etik di lingkungan pemerintahan.

5. Tujuan dari Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi etis dan disiplin memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. **Menegakkan Keadilan:** Sanksi bertujuan untuk memberikan keadilan, baik bagi pegawai yang melanggar maupun bagi masyarakat yang menjadi pihak yang dirugikan.
- b. **Memberikan Pembelajaran:** Sanksi juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi pegawai lainnya agar

lebih berhati-hati dan selalu menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku.

- c. **Menjaga Kualitas Pelayanan Publik:** Dengan menegakkan disiplin dan kode etik, diharapkan pegawai pemerintahan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- d. **Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan:** Penerapan sanksi juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah di mata publik, menunjukkan bahwa pelanggaran etis tidak akan dibiarkan begitu saja.

BAB

4

MASALAH ETIKA DALAM PEMERINTAHAN

A. Korupsi

Korupsi dalam pemerintahan adalah salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi mencakup segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan kepentingan publik. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk suap, pemerasan, nepotisme, serta penyalahgunaan anggaran dan sumber daya negara. Korupsi memiliki dampak yang luas dan serius dalam pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan efektif.

1. Dampak Korupsi dalam Pemerintahan

Korupsi tidak hanya merusak integritas aparaturnegara, tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa dampak korupsi antara lain:

- a. **Merugikan Keuangan Negara:** Korupsi menyebabkan pemborosan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemborosan ini menghambat kemajuan negara dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Misalnya, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk

pembangunan jalan raya dapat diselewengkan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab.

- b. Meningkatkan Ketidaksetaraan Sosial:** Korupsi memperburuk ketimpangan sosial dengan mengalihkan sumber daya dari program-program yang menguntungkan masyarakat miskin dan lemah. Hal ini memperburuk akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar.
- c. Mengurangi Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah:** Ketika korupsi marak, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Kepercayaan publik yang rendah dapat menyebabkan instabilitas politik dan sosial, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan pembangunan.
- d. Menyebabkan Inefisiensi dan Kinerja Pemerintahan yang Buruk:** Korupsi mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak objektif, yang seringkali didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Akibatnya, proyek-proyek pemerintah seringkali gagal atau terlambat, dan kualitas pelayanan publik menurun. Misalnya, proses tender proyek yang tidak transparan dapat menyebabkan terpilihnya kontraktor yang tidak kompeten, yang akhirnya mengakibatkan pekerjaan berkualitas rendah.
- e. Meningkatkan Kemiskinan:** Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat, masyarakat yang membutuhkan dana tersebut menjadi semakin miskin. Korupsi juga menghalangi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan ekonomi yang adil.

2. Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan

Pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Salah satu cara efektif untuk mencegah korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan proyek dapat diakses oleh publik. Dalam hal ini, **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008** tentang *Keterbukaan Informasi Publik* menjadi landasan penting untuk memastikan keterbukaan informasi dalam setiap kegiatan pemerintahan.
- b. **Penerapan Teknologi Informasi:** Penggunaan teknologi informasi dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi. Sistem elektronik dalam pengelolaan anggaran, tender proyek, dan pengawasan keuangan dapat meminimalkan campur tangan manusia yang sering kali menjadi pintu masuk praktik korupsi. Penggunaan sistem **e-Government** dan **e-Procurement** dapat mempermudah pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas.
- c. **Pendidikan dan Sosialisasi Anti-Korupsi:** Sosialisasi mengenai bahaya dan dampak korupsi harus dilakukan secara intensif kepada seluruh aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendidikan anti-korupsi juga harus diterapkan dalam sistem pendidikan formal untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Hal ini juga termasuk pelatihan kepada pegawai pemerintah tentang kode etik dan standar moral yang tinggi.
- d. **Pemberdayaan Lembaga Pengawas:** Lembaga pengawasan, seperti **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**, dan **Inspektorat** harus diberdayakan untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Lembaga-lembaga ini harus diberi kewenangan yang kuat dan independen untuk

menyelidiki dugaan korupsi dan memberikan rekomendasi terkait penindakan.

- e. **Penguatan Sistem Pengendalian Internal:** Sistem pengendalian internal yang kuat dalam pemerintahan dapat mengurangi peluang korupsi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap lembaga memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Salah satu contohnya adalah **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** yang membantu mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
- f. **Sanksi yang Tegas dan Pemberian Hukuman:** Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi merupakan langkah penting dalam menekan tingkat korupsi. Pemidanaan terhadap pejabat yang terbukti melakukan korupsi harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

3. Peraturan yang Terkait dengan Pencegahan Korupsi

- a. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yang kemudian diperbarui dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pemberantasan korupsi, memberikan sanksi pidana kepada pelaku korupsi, serta mengatur mengenai proses penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi.
- b. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan tugas pemerintah.

- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil* yang mengatur tentang kewajiban pegawai negeri sipil untuk bertindak dengan jujur dan tidak terlibat dalam praktik korupsi.

4. Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah korupsi. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat adalah:

- a. **Menggunakan Hak Suara dengan Bijak:** Masyarakat harus memilih pemimpin yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik dalam hal pencegahan korupsi.
- b. **Melaporkan Tindak Pidana Korupsi:** Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi dengan melaporkan segala bentuk tindakan korupsi kepada lembaga yang berwenang, seperti KPK atau Ombudsman.
- c. **Partisipasi dalam Proses Pengawasan:** Masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik melalui forum-forum yang ada, seperti musyawarah perencanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat dalam program-program pemerintah.

B. Nepotisme dan Kolusi

Nepotisme dan kolusi adalah dua fenomena yang sering kali ditemukan dalam praktik pemerintahan yang tidak bersih. Kedua istilah ini merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu melalui hubungan kekeluargaan (nepotisme) dan kerjasama ilegal atau tersembunyi antar individu atau kelompok untuk meraih tujuan tertentu (kolusi). Kedua praktik ini dapat merusak sistem pemerintahan, mengurangi efisiensi, dan menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.

1. Nepotisme dalam Pemerintahan

Nepotisme adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan memberikan keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat dalam bentuk jabatan, kontrak, atau hak

lainnya, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang sebenarnya. Dalam konteks pemerintahan, nepotisme biasanya melibatkan pejabat negara yang menunjuk anggota keluarganya untuk menduduki posisi strategis, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan atau pengalaman yang memadai.

Dampak Nepotisme:

- a. **Menurunnya Kualitas Keputusan:** Ketika keputusan pemerintahan dipengaruhi oleh hubungan keluarga, bukan berdasarkan kompetensi atau kepentingan publik, kebijakan yang diambil sering kali tidak efektif dan tidak menguntungkan masyarakat (Ferry & Susilo, 2021).
- b. **Ketidakadilan dalam Penempatan Posisi:** Nepotisme mengabaikan prinsip meritokrasi dalam pemerintahan. Pegawai atau pejabat yang seharusnya mendapatkan posisi berdasarkan kompetensi dan prestasi, justru tersisih karena adanya intervensi keluarga atau hubungan pribadi. Ini mengurangi kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pemerintahan (Ferry & Susilo, 2021).
- c. **Menciptakan Konflik Kepentingan:** Nepotisme dapat menyebabkan konflik kepentingan ketika seorang pejabat harus membuat keputusan yang mempengaruhi anggota keluarganya. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak objektif dan merugikan kepentingan umum (Ferry & Susilo, 2021).

Contoh Kasus Nepotisme: Penunjukan Pejabat Berdasarkan Keekerabatan: Seorang pejabat negara mengangkat saudaranya sebagai kepala dinas atau direktur di sebuah lembaga pemerintah, meskipun orang tersebut tidak memiliki pengalaman atau kualifikasi yang sesuai dengan jabatan tersebut.

2. Kolusi dalam Pemerintahan

Kolusi adalah tindakan kerjasama tersembunyi atau ilegal antara pihak-pihak tertentu, baik itu antar pejabat pemerintahan, perusahaan, atau individu, untuk mencapai tujuan yang merugikan kepentingan publik atau negara.

Kolusi sering kali terjalin dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan transaksi yang tidak sah atau manipulasi kebijakan, misalnya dalam proses lelang proyek pemerintah atau penyalahgunaan anggaran.

Dampak Kolusi:

- a. **Kehilangan Kepercayaan Publik:** Ketika masyarakat mengetahui adanya kolusi dalam pengambilan keputusan pemerintahan, kepercayaan mereka terhadap integritas dan transparansi pemerintah akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Rachmawati, 2020).
- b. **Meningkatkan Biaya dan Inefisiensi:** Kolusi dapat menyebabkan proyek-proyek pemerintahan dijalankan dengan biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya, karena pihak-pihak yang terlibat dalam kolusi sering kali memanipulasi anggaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini mengurangi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik (Rachmawati, 2020).
- c. **Merusak Prinsip Persaingan yang Adil:** Kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa atau tender proyek dapat merusak persaingan yang sehat, menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki koneksi dengan pejabat pemerintahan, dan merugikan perusahaan atau individu lain yang lebih layak (Rachmawati, 2020).

Contoh Kasus Kolusi: Proyek Infrastruktur yang Dimenangkan oleh Perusahaan Tertentu: Dalam suatu proyek infrastruktur, pejabat pemerintah berkolusi dengan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas atau kualifikasi yang memadai untuk menyelesaikan proyek tersebut.

3. Pengaruh Nepotisme dan Kolusi terhadap Keputusan Pemerintahan

Kedua praktik ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap integritas dan kualitas pemerintahan. Berikut adalah beberapa pengaruhnya terhadap keputusan pemerintahan:

- a. **Kebijakan yang Tidak Adil dan Tidak Efektif:** Ketika keputusan pemerintahan dipengaruhi oleh nepotisme dan kolusi, kebijakan yang diambil cenderung lebih menguntungkan kelompok tertentu atau individu yang memiliki hubungan pribadi dengan pejabat, daripada masyarakat umum. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan publik secara merata (Ferry & Susilo, 2021).
- b. **Kerusakan Sistem Meritokrasi:** Pemerintahan yang berbasis pada nepotisme dan kolusi sering kali mengabaikan prinsip meritokrasi, yang seharusnya menempatkan individu pada posisi berdasarkan kemampuan dan prestasi. Sebaliknya, posisi-posisi penting dikuasai oleh mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah, bukan yang paling kompeten dalam bidangnya (Ferry & Susilo, 2021).
- c. **Penyalahgunaan Sumber Daya Negara:** Kolusi sering kali menyebabkan penyalahgunaan anggaran negara, dengan sebagian besar dana digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang terlibat dalam kolusi. Ini mengurangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat (Rachmawati, 2020).
- d. **Penyebaran Budaya Korupsi:** Nepotisme dan kolusi menciptakan lingkungan yang subur bagi terjadinya korupsi. Ketika pejabat atau individu dalam pemerintahan menganggap bahwa mereka dapat mendapatkan keuntungan pribadi melalui praktik-praktik ilegal, mereka lebih cenderung terlibat dalam korupsi, yang semakin merusak sistem pemerintahan (Ferry & Susilo, 2021).

4. Upaya Pencegahan Nepotisme dan Kolusi

Untuk mencegah terjadinya nepotisme dan kolusi dalam pemerintahan, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. **Penerapan Prinsip Transparansi:** Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dengan transparansi penuh. Setiap langkah harus dapat dipantau oleh masyarakat dan lembaga pengawas (Rachmawati, 2020).
- b. **Penguatan Sistem Pengawasan:** Lembaga pengawas seperti **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** dan **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dan independen untuk menyelidiki dugaan praktik nepotisme dan kolusi di dalam pemerintahan (Rachmawati, 2020).
- c. **Pendidikan dan Sosialisasi Integritas:** Aparatur negara perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan tentang etika pemerintahan dan pentingnya integritas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan profesional (Ferry & Susilo, 2021).
- d. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Aparatur negara yang terbukti terlibat dalam praktik nepotisme atau kolusi harus dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik-praktik serupa di masa depan (Ferry & Susilo, 2021).

Peraturan yang Terkait dengan Nepotisme dan Kolusi:

- a. **Undang-Undang No. 31 Tahun 1999** tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001). Undang-undang ini menetapkan larangan bagi pejabat negara untuk terlibat dalam praktik korupsi, termasuk kolusi dan nepotisme.
- b. **Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010** tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil* yang mengatur tentang kewajiban pegawai negeri untuk menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tanpa pengaruh pribadi, termasuk dalam hal keputusan yang melibatkan nepotisme dan kolusi.

- c. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008** tentang *Keterbukaan Informasi Publik*, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan publik dan mencegah kolusi serta nepotisme yang dilakukan dalam keputusan-keputusan tersebut.

C. Pelayanan Publik yang Tidak Merata

Pelayanan publik merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, sering kali pelayanan publik tidak merata, baik dalam hal distribusi layanan, kualitas, maupun aksesibilitas. Ketidakmerataan dalam pelayanan publik dapat menciptakan ketidakadilan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung, seperti daerah terpencil, masyarakat miskin, atau kelompok minoritas.

1. Masalah Ketidakmerataan dalam Pelayanan Publik

Ketidakmerataan dalam pelayanan publik terjadi ketika terdapat kesenjangan dalam akses, kualitas, dan distribusi layanan antara daerah atau kelompok tertentu. Beberapa masalah yang sering ditemukan adalah:

- a. **Akses yang Terbatas di Daerah Terpencil:** Di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sering kali tidak memadai atau tidak tersedia sama sekali. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam kualitas hidup antara daerah perkotaan dan pedesaan (Hadi, 2022).
- b. **Kesulitan Akses bagi Kelompok Marjinal:** Kelompok marjinal seperti perempuan, anak-anak, difabel, dan masyarakat miskin sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik yang mereka butuhkan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya menjadi hambatan yang mempersulit mereka untuk mendapatkan pelayanan yang setara dengan kelompok lainnya (Junaedi, 2021).

- c. **Kualitas Pelayanan yang Tidak Merata:** Di beberapa daerah, kualitas pelayanan publik sangat baik, sedangkan di daerah lain, pelayanan tersebut jauh di bawah standar. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, atau anggaran yang tidak merata (Fitriani, 2023).
- d. **Keterlambatan dalam Penyampaian Layanan:** Di banyak tempat, pelayanan publik sering terlambat diberikan, terutama di daerah yang lebih terpencil atau memiliki masalah infrastruktur yang buruk. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan segera, seperti pelayanan kesehatan darurat (Fitriani, 2023).

2. Dampak Ketidakmerataan Pelayanan Publik

Ketidakmerataan dalam pelayanan publik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, antara lain:

- a. **Meningkatnya Ketidakadilan Sosial:** Ketika masyarakat di daerah atau kelompok tertentu tidak menerima pelayanan yang setara dengan kelompok lainnya, ketidakadilan sosial akan semakin terasa. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Junaedi, 2021).
- b. **Peningkatan Ketimpangan Ekonomi:** Ketidakmerataan dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan, misalnya, dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berkembang secara ekonomi. Masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai akan kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, yang akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat (Hadi, 2022).
- c. **Menurunnya Kepercayaan terhadap Pemerintah:** Ketika pelayanan publik tidak merata, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan

layanan yang adil dan merata. Hal ini dapat berujung pada ketidakpuasan yang besar terhadap kebijakan pemerintah (Fitriani, 2023).

3. Solusi untuk Mengatasi Ketidakmerataan dalam Pelayanan Publik

Untuk mengatasi masalah ketidakmerataan dalam pelayanan publik, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Peningkatan Infrastruktur dan Akses di Daerah Terpencil:** Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, dan teknologi informasi tersedia di daerah terpencil agar pelayanan publik dapat dijangkau dengan lebih mudah oleh masyarakat (Hadi, 2022). Program seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan sekolah di daerah terpencil juga sangat diperlukan.
- b. Program Inklusi Sosial:** Pemerintah perlu menerapkan kebijakan inklusi sosial yang memastikan bahwa kelompok marjinal dan rentan mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan publik. Hal ini mencakup penerapan layanan yang ramah difabel, akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, serta kebijakan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Junaedi, 2021).
- c. Reformasi Administrasi Publik:** Pemerintah perlu melakukan reformasi dalam pengelolaan dan distribusi layanan publik untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya lainnya dialokasikan dengan adil. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi aparatur negara agar lebih kompeten dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata (Fitriani, 2023).
- d. Penerapan Teknologi untuk Memperluas Akses:** Teknologi informasi dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pelayanan publik, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah dapat mengimplementasikan layanan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat

dalam mengakses informasi dan layanan tanpa harus datang langsung ke instansi pemerintahan (Hadi, 2022).

- e. **Pengawasan dan Evaluasi Berkala:** Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap program pelayanan publik sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan merata. Lembaga pengawas seperti **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** dapat memainkan peran penting dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kesetaraan layanan yang diberikan kepada masyarakat (Fitriani, 2023).

Peraturan Terkait dengan Pelayanan Publik yang Merata

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang ini adalah landasan hukum utama dalam mengatur tentang pelayanan publik di Indonesia. UU ini mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang adil, transparan, akuntabel, dan merata bagi seluruh masyarakat. Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain:

- 1) **Standar Pelayanan:** Pemerintah wajib menetapkan standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pelayanan publik. Ini mencakup waktu layanan, kualitas layanan, dan aksesibilitasnya bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang.
- 2) **Hak Masyarakat:** UU ini menggarisbawahi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, yang tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan prosedur dan kualitas pelayanan.
- 3) **Evaluasi dan Pengawasan:** Setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Pengawasan juga dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk, untuk

memastikan bahwa pelayanan publik memenuhi standar yang ditetapkan dan diterima secara merata oleh masyarakat.

b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sangat penting untuk memastikan pelayanan publik dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa hal penting yang diatur dalam UU ini antara lain:

- 1) **Hak Akses Informasi:** Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti prosedur, biaya, waktu layanan, dan standar pelayanan. Informasi ini harus disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) **Kewajiban Pemerintah:** Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan informasi terkait pelayanan publik kepada masyarakat, baik melalui situs web pemerintah, media sosial, atau saluran komunikasi lainnya yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 3) **Penyelesaian Sengketa Informasi:** Apabila ada sengketa terkait akses informasi, UU ini memberikan jalur penyelesaian melalui Komisi Informasi, yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

c. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Presiden ini dirancang untuk mendorong pembangunan daerah-daerah yang tertinggal, dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Dalam konteks pelayanan publik, peraturan ini berfokus pada distribusi

yang lebih merata dari sumber daya dan fasilitas pelayanan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang kurang berkembang. Beberapa poin utama dari Peraturan Presiden ini adalah:

- 1) **Fokus pada Infrastruktur:** Salah satu fokus utama dari Perpres ini adalah pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah tertinggal. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang dapat mendukung pelayanan publik yang lebih merata.
- 2) **Pengalokasian Anggaran:** Peraturan ini juga mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk daerah-daerah tertinggal, sehingga lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 3) **Keterlibatan Masyarakat Lokal:** Perpres ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan lokal.

BAB 5

ETIKA PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS GLOBAL

A. Etika Pemerintahan di Negara Lain

Etika pemerintahan mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh pemerintah dan aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penerapan etika pemerintahan dapat bervariasi antara negara maju dan berkembang, karena dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, sistem politik, serta tingkat kemajuan ekonomi dan sosial. Dalam bagian ini, kita akan membahas contoh penerapan etika pemerintahan di beberapa negara maju dan berkembang.

1. Etika Pemerintahan di Negara Maju

Di negara maju, etika pemerintahan sering kali lebih mapan dan terstruktur, dengan aturan yang jelas dan lembaga yang kuat untuk mengawasi penerapannya. Berikut adalah contoh etika pemerintahan di beberapa negara maju:

a. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, etika pemerintahan sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan individu. Konsep *transparency* (transparansi) dan *accountability* (akuntabilitas) sangat ditekankan, baik di tingkat federal maupun negara bagian. Salah satu referensi penting dalam etika pemerintahan di AS adalah **Freedom of Information Act (FOIA)** yang mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Undang-undang ini memungkinkan warga negara untuk memantau dan mengawasi kebijakan

publik serta mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, **Code of Ethics for Government Service**, yang dikeluarkan oleh pemerintah AS, mengatur kewajiban pejabat publik untuk menjunjung tinggi integritas dan menghindari konflik kepentingan. Pejabat publik diwajibkan untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan publik, dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi.

b. Swedia

Di Swedia, etika pemerintahan berfokus pada prinsip *transparansi* dan *partisipasi publik*. Pemerintah Swedia sangat menghargai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan administrasi negara. Etika pemerintahan di Swedia berlandaskan pada **The Swedish Instrument of Government** yang menjamin hak publik untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah dan prosedur administrasi.

Salah satu prinsip penting dalam etika pemerintahan Swedia adalah "**public service neutrality**", yang mengharuskan pegawai negeri untuk bertindak secara netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, kelompok, atau individu tertentu. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan adil dan tanpa bias, serta agar tidak ada diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu.

c. Jepang

Etika pemerintahan di Jepang dikenal dengan "**giri**" (tanggung jawab moral) yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat dan pemerintahan. Para pejabat publik di Jepang diharapkan untuk memiliki rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap masyarakat dan negara. Salah satu ciri khas etika pemerintahan di Jepang adalah prinsip "**kebenaran di atas segalanya**", yang berarti bahwa setiap keputusan pemerintah harus didasarkan

pada fakta dan data yang objektif, serta tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan politik pribadi.

Pemerintah Jepang juga memiliki kode etik yang mengatur integritas aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini mengharuskan pejabat publik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap tindakan mereka.

2. Etika Pemerintahan di Negara Berkembang

Di negara berkembang, penerapan etika pemerintahan sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti masalah korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan kesenjangan sosial yang signifikan. Namun, beberapa negara berkembang telah mengembangkan kebijakan dan sistem untuk memperbaiki etika pemerintahan mereka. Berikut adalah beberapa contoh penerapan etika pemerintahan di negara berkembang:

a. India

India memiliki tantangan besar dalam hal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sejak beberapa dekade terakhir, pemerintah India telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki etika pemerintahan, seperti **The Lokpal and Lokayuktas Act (2013)** yang mendirikan lembaga pengawas yang bertugas menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Selain itu, **Right to Information Act (2005)** memungkinkan warga negara untuk meminta informasi terkait dengan kebijakan dan keputusan pemerintah, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah India juga memperkenalkan program-program untuk meningkatkan etika pelayanan publik dan mengurangi diskriminasi, seperti **e-governance** untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik secara digital dan mengurangi praktik birokrasi yang tidak efisien.

b. Brazil

Etika pemerintahan di Brasil sangat dipengaruhi oleh masalah korupsi yang sistemik di banyak tingkat pemerintahan. Namun, sejak krisis korupsi yang terungkap melalui **Operasi Lava Jato**, Brasil telah memperkenalkan serangkaian reformasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu reformasi penting adalah undang-undang yang mengatur "**Clean Record**", yang melarang pejabat publik yang terlibat dalam tindakan korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu.

Selain itu, Brasil juga memberlakukan peraturan yang mengharuskan perusahaan besar yang beroperasi di negara tersebut untuk mematuhi standar etika tertentu, termasuk dalam hal penghindaran suap dan pencucian uang. Pemerintah Brasil bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkuat hukum anti-korupsi dan meningkatkan pengawasan terhadap sektor publik.

c. Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, etika pemerintahan sangat terpengaruh oleh sejarah apartheid dan perjuangan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan inklusif. Sejak berakhirnya apartheid, pemerintah Afrika Selatan telah berkomitmen untuk menerapkan etika pemerintahan yang mendukung **good governance**, yang mencakup transparansi, partisipasi publik, dan pemberantasan korupsi.

Public Protector, sebuah lembaga yang independen, memiliki peran penting dalam memeriksa keluhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pejabat publik yang terlibat dalam pelanggaran etika. Lembaga ini juga bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah melayani kepentingan publik dengan adil dan tanpa diskriminasi.

3. Perbedaan dan Persamaan dalam Etika Pemerintahan di Negara Maju dan Berkembang

- a. Persamaan:** Di negara maju dan berkembang, etika pemerintahan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pejabat publik. Setiap negara memiliki kebijakan yang mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi dan mengawasi kebijakan pemerintah. Di samping itu, kebanyakan negara juga memiliki lembaga pengawas untuk menangani pelanggaran etika dan mencegah terjadinya korupsi.
- b. Perbedaan:** Negara maju cenderung memiliki sistem pengawasan dan pengaturan yang lebih stabil dan efektif, dengan adanya lembaga-lembaga pengawas yang independen dan sumber daya yang lebih memadai. Sebaliknya, negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal penerapan etika pemerintahan, karena seringkali ada masalah dengan sistem peradilan yang lemah, korupsi yang meluas, dan infrastruktur yang tidak memadai.

B. Tantangan Etika dalam Globalisasi

Globalisasi, yang ditandai dengan integrasi ekonomi, politik, dan sosial di seluruh dunia, telah membawa perubahan besar dalam cara pemerintahan di seluruh dunia beroperasi. Di satu sisi, globalisasi menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kerjasama internasional, tetapi di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan besar dalam hal etika pemerintahan. Perubahan ini dapat memengaruhi prinsip-prinsip dasar etika pemerintahan, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana globalisasi mempengaruhi etika pemerintahan di dunia.

1. Pengaruh Positif Globalisasi terhadap Etika Pemerintahan

Beberapa aspek dari globalisasi dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat etika pemerintahan di dunia, antara lain:

a. Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi

Globalisasi telah memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat dan terbuka melalui teknologi, terutama internet dan media sosial. Dengan adanya akses informasi yang lebih mudah, pemerintah di berbagai negara tertekan untuk lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik. Media global juga berperan dalam mengawasi pemerintah dan mengungkapkan praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang (Sutrisno, 2020).

Salah satu contoh dampak positif globalisasi terhadap transparansi adalah **Convention on Access to Information** yang diadopsi oleh negara-negara dalam **United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)**. Konvensi ini mendorong negara-negara untuk memberikan akses informasi publik kepada masyarakat secara lebih terbuka.

b. Kerjasama Internasional untuk Memperbaiki Etika Pemerintahan

Dalam era globalisasi, negara-negara saling berinteraksi lebih intensif melalui kerjasama internasional. Organisasi-organisasi internasional seperti **United Nations (UN)**, **World Bank**, dan **International Monetary Fund (IMF)** berperan penting dalam memberikan panduan tentang standar etika dalam pemerintahan dan pencegahan korupsi. Negara-negara kini lebih terdorong untuk memperkuat sistem hukum dan lembaga pengawasan mereka agar sejalan dengan standar internasional dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai contoh, **United Nations Convention against Corruption (UNCAC)** yang disahkan pada tahun 2003, berfungsi sebagai instrumen internasional untuk memberantas korupsi di seluruh dunia. Negara-negara yang menjadi anggota diharuskan untuk mengadopsi

kebijakan anti-korupsi yang lebih ketat dalam pemerintahan mereka.

c. Peran Teknologi dalam Memperbaiki Layanan Publik

Globalisasi, melalui perkembangan teknologi, memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan adil. Misalnya, di banyak negara berkembang, **e-governance** atau pemerintahan berbasis teknologi telah diperkenalkan untuk memperbaiki akuntabilitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Penggunaan teknologi dapat mengurangi peluang untuk praktik-praktik yang tidak etis, seperti suap dan pemerasan dalam pelayanan publik (Yuliana, 2022).

2. Tantangan Etika Pemerintahan Akibat Globalisasi

Namun, globalisasi juga membawa sejumlah tantangan dalam menjaga etika pemerintahan, terutama di negara-negara berkembang. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

a. Peningkatan Korupsi dan Ketimpangan

Globalisasi meningkatkan aliran modal dan investasi internasional, tetapi juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial. Di beberapa negara berkembang, meningkatnya investasi asing dapat mendorong praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat merusak prinsip etika pemerintahan yang mengedepankan keadilan dan integritas.

Sebagai contoh, beberapa negara yang tergantung pada sumber daya alam seringkali mengalami masalah dengan korupsi terkait dengan sektor ekstraksi sumber daya alam (minyak, gas, dan mineral). Korupsi ini dapat diperburuk oleh perusahaan internasional yang beroperasi di negara-negara tersebut dengan tidak mematuhi prinsip etika dan transparansi (Hadi, 2021).

b. Pengaruh Positif dan Negatif dari Media Sosial

Media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan. Namun, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam beberapa kasus, informasi yang tidak akurat atau manipulatif dapat memicu ketidakpuasan yang tidak berdasar atau menciptakan kerusuhan sosial.

Pemerintah juga harus menghadapi tantangan etika dalam mengelola penggunaan media sosial, misalnya dengan menghindari penyalahgunaan data pribadi atau pengawasan yang berlebihan terhadap warganya (Yuliana, 2022). Hal ini menjadi lebih rumit dalam konteks globalisasi, di mana informasi dan data bergerak dengan cepat melintasi batas negara.

c. Ketergantungan pada Kapitalisme Global

Dalam era globalisasi, negara-negara menjadi semakin terikat dengan pasar global dan kapitalisme internasional. Hal ini sering kali menyebabkan penurunan perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, kebijakan pemerintahan di negara-negara berkembang dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi besar atau organisasi internasional yang memiliki kepentingan tertentu. Terkadang, keputusan yang diambil lebih mengutamakan keuntungan ekonomi daripada kesejahteraan rakyat, yang dapat melanggar prinsip keadilan dan pemerintahan yang baik (Sutrisno, 2020).

d. Penurunan Kedaulatan Negara

Globalisasi juga dapat mengurangi kedaulatan negara dalam hal pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Ketergantungan pada lembaga-lembaga internasional dan organisasi multinasional membuat negara-negara semakin sulit untuk membuat keputusan

yang sepenuhnya mencerminkan kepentingan nasional mereka. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara kepentingan global dan kepentingan lokal yang menyulitkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai etika yang ada di negara mereka.

3. Solusi untuk Menghadapi Tantangan Etika dalam Globalisasi

Untuk menghadapi tantangan-tantangan etika yang ditimbulkan oleh globalisasi, negara-negara perlu mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang lebih adaptif, antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan untuk Mengelola Globalisasi

Negara perlu memperkuat kapasitas administrasi publik mereka untuk mengelola dampak globalisasi secara efektif. Ini termasuk meningkatkan kualitas birokrasi, memperkenalkan kebijakan anti-korupsi yang lebih tegas, dan mendukung transparansi dalam setiap aspek pemerintahan (Hadi, 2021). Selain itu, pemerintahan harus bisa menyesuaikan kebijakan mereka dengan dinamika global sambil tetap mempertahankan kepentingan lokal.

b. Pemberdayaan Masyarakat Sipil dan Partisipasi Publik

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berpegang pada prinsip etika dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pemberdayaan masyarakat sipil dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan (Sutrisno, 2020).

c. Pengaturan yang Lebih Ketat terhadap Perusahaan Multinasional

Negara-negara harus bekerja sama dalam menetapkan regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah mereka. Kebijakan ini harus memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi prinsip etika dalam hal keberlanjutan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Yuliana, 2022).

Globalisasi menawarkan peluang besar untuk perbaikan etika pemerintahan, namun juga menimbulkan tantangan yang kompleks. Negara-negara di seluruh dunia perlu memperkuat sistem pemerintahan mereka untuk menangani tantangan ini, dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan. Pengawasan internasional, kerjasama antarnegara, serta peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa pemerintahan tetap berfokus pada kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip etika yang luhur.

BAB 6

MEMBANGUN ETIKA DALAM PEMERINTAHAN

A. Pendidikan Etika untuk Aparatur Pemerintah

Pendidikan etika bagi aparatur pemerintah memainkan peran penting dalam membangun integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Sebagai penjaga dan pelaksana kebijakan publik, aparatur pemerintahan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan etika perlu dijadikan prioritas untuk memfasilitasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

1. Pengertian Pendidikan Etika bagi Aparatur Pemerintah

Pendidikan etika bagi aparatur pemerintah adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali pejabat publik dengan pemahaman mengenai nilai-nilai moral yang harus dipegang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pendidikan ini juga memberikan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan adil dalam berbagai situasi (Purnomo, 2022). Menurut Sutrisno (2020), pendidikan etika juga mencakup pelatihan tentang kode etik dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas mereka, untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

2. Tujuan Pendidikan Etika dalam Pemerintahan

Tujuan utama dari pendidikan etika bagi aparatur pemerintah adalah untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan pendidikan ini, para pejabat publik diharapkan dapat menghindari tindakan yang merugikan negara, seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan (Purnomo, 2022). Pendidikan etika juga bertujuan untuk membangun akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan pemerintahan, yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan (Sutrisno, 2020).

3. Metode dan Pendekatan dalam Pendidikan Etika untuk Aparatur Pemerintah

Untuk memastikan pendidikan etika bagi aparatur pemerintah efektif, berbagai metode dan pendekatan dapat diterapkan. Salah satunya adalah melalui pelatihan dan workshop yang mengkhususkan diri dalam etika pemerintahan. Program pelatihan ini, seperti yang disarankan oleh Mulyadi (2021), harus melibatkan studi kasus dan diskusi yang memungkinkan peserta untuk menganalisis masalah etika yang sering muncul dalam pemerintahan dan cara-cara yang etis untuk mengatasinya. Selain itu, modul e-learning juga bisa menjadi metode yang efisien untuk memastikan pelatihan ini dapat diakses oleh seluruh aparat pemerintahan di berbagai daerah.

4. Implementasi Pendidikan Etika dalam Pemerintahan

Pendidikan etika harus diintegrasikan ke dalam sistem birokrasi untuk memastikan para aparatur pemerintahan memperoleh pelatihan yang relevan. Hal ini mencakup penyusunan kurikulum etika pemerintahan yang komprehensif, seperti yang diusulkan oleh Sutrisno (2020), yang tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga praktik nyata dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang etis. Pemerintah juga harus memastikan adanya evaluasi

terhadap penerapan pendidikan etika ini melalui mekanisme pengawasan yang ketat (Purnomo, 2022).

5. Tantangan dalam Pendidikan Etika bagi Aparatur Pemerintah

Meskipun pendidikan etika memiliki potensi besar untuk memperbaiki perilaku aparatur pemerintahan, masih ada tantangan besar dalam implementasinya. Menurut Mulyadi (2021), salah satu tantangan terbesar adalah adanya resistensi dari dalam sistem birokrasi yang cenderung tidak mengutamakan perubahan, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya etika. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah budaya birokrasi agar lebih menghargai dan mengutamakan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan.

Pendidikan etika bagi aparatur pemerintah sangat penting untuk membangun profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik. Dengan membekali mereka dengan pemahaman yang kuat mengenai kode etik dan nilai-nilai moral, diharapkan para pejabat publik dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan etika diintegrasikan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia dalam birokrasi agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Peraturan yang Relevan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa salah satu tujuan pembinaan ASN adalah untuk meningkatkan kompetensi dan integritas, yang merupakan bagian dari pendidikan etika di kalangan aparatur pemerintahan. Pendidikan etika ini bertujuan agar ASN dapat menjadi profesional, bertanggung jawab, dan menjalankan tugas dengan integritas yang tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan ini mengatur tentang perilaku disiplin aparatur negara, yang mencakup pedoman etika dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Salah satu poin dalam peraturan ini adalah kewajiban bagi setiap pegawai negeri untuk menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan yang merugikan negara.

3. Kode Etik Pemerintah Indonesia (Badan Kepegawaian Negara)

Kode etik ini mengatur tata cara berperilaku aparatur negara dalam menjalankan tugasnya, dengan penekanan pada pentingnya profesionalisme, kejujuran, akuntabilitas, dan penghindaran terhadap konflik kepentingan. Pendidikan tentang kode etik ini perlu diterapkan dalam pendidikan etika untuk semua aparatur pemerintah.

B. Kebijakan Pemerintahan yang Beretika

Pembuatan kebijakan dalam pemerintahan tidak hanya berfokus pada efektivitas dan efisiensi, tetapi juga pada pemenuhan standar etika yang tinggi. Kebijakan yang beretika adalah kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan publik dan keberlanjutan, tetapi juga nilai-nilai moral dan integritas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang beretika menjadi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

1. Pengertian Kebijakan Pemerintahan yang Beretika

Kebijakan pemerintahan yang beretika adalah kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi dan bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan cara yang adil, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini juga mencakup pertimbangan mengenai dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Menurut Prabowo dan Aziz (2021), kebijakan pemerintahan yang beretika

memerlukan pendekatan yang mencakup partisipasi masyarakat, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta keadilan dalam distribusi sumber daya publik.

2. Prinsip-prinsip Kebijakan Pemerintahan yang Beretika

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan pemerintahan yang beretika, yaitu:

a. Keadilan

Kebijakan pemerintahan harus memperhatikan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya dan layanan publik. Keputusan yang diambil harus memastikan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat, terutama yang kurang beruntung, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara (Santoso, 2020). Kebijakan ini juga harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan berusaha mengurangi ketidaksetaraan sosial.

b. Transparansi

Pemerintah harus memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan transparansi. Hal ini berarti bahwa informasi terkait kebijakan dan proses pengambilan keputusan harus terbuka untuk umum, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks anggaran negara, pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas tentang sumber daya yang dialokasikan dan bagaimana anggaran tersebut digunakan (Fahmi, 2022).

c. Akuntabilitas

Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil kepada publik. Ini mencakup pertanggungjawaban baik secara moral maupun hukum atas dampak kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang diambil harus memiliki mekanisme evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat (Prabowo & Aziz, 2021).

d. Partisipasi Masyarakat

Kebijakan yang beretika harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini mencakup konsultasi publik, dialog, dan umpan balik dari berbagai kelompok yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Melalui partisipasi ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memiliki dukungan yang lebih besar.

3. Proses Pengembangan Kebijakan yang Beretika

Proses pengembangan kebijakan pemerintahan yang beretika melibatkan beberapa langkah utama yang bertujuan untuk memastikan kebijakan tersebut tidak hanya efektif tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika:

a. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

Langkah pertama dalam pengembangan kebijakan adalah memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menganalisis kebutuhan mereka. Pemerintah harus melakukan riset dan kajian untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dibuat benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang ada dan menjawab kebutuhan masyarakat (Sutrisno & Hadi, 2023).

b. Analisis Dampak Etis

Sebelum kebijakan diterapkan, penting untuk melakukan analisis dampak etis yang mencakup penilaian terhadap potensi dampak kebijakan terhadap masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan. Kebijakan harus dianalisis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan atau diskriminasi (Fahmi, 2022).

c. Partisipasi dan Konsultasi Publik

Selama proses pengembangan kebijakan, pemerintah harus memastikan adanya konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari masyarakat, LSM, akademisi, maupun sektor swasta. Partisipasi publik ini akan memperkaya perspektif dan

membantu memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mengedepankan keadilan.

d. Penyusunan Kebijakan yang Transparan dan Akuntabel

Setelah melalui proses konsultasi, kebijakan yang diusulkan harus disusun dengan jelas, terukur, dan transparan. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan kebijakan, proses implementasi, serta cara evaluasi kebijakan tersebut. Hal ini juga termasuk pemantauan dan pelaporan secara teratur mengenai perkembangan dan dampak kebijakan tersebut.

4. Contoh Kebijakan Pemerintahan yang Beretika

Beberapa contoh kebijakan pemerintahan yang beretika dapat ditemukan di berbagai negara yang telah mengadopsi prinsip-prinsip etika dalam pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark terkenal dengan kebijakan pemerintahannya yang transparan dan berfokus pada kesejahteraan sosial. Kebijakan kesejahteraan sosial di negara-negara ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan sosial. Selain itu, kebijakan antikorupsi yang ketat dan pengawasan publik yang transparan menjadi bagian penting dalam menjamin kebijakan tersebut beretika (Santoso, 2020).

5. Tantangan dalam Pengembangan Kebijakan Pemerintahan yang Beretika

Tantangan utama dalam mengembangkan kebijakan yang beretika adalah adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau sektoral yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, ada pula tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi dapat diterapkan dengan efektif di lapangan.

Tantangan lainnya adalah pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang sering kali kurang maksimal. Kebijakan yang baik tidak akan efektif jika tidak ada sistem pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan.

Kebijakan pemerintahan yang beretika adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Pengembangan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai etika akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa merugikan kelompok tertentu. Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan keadilan menjadi prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

C. Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan

Partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan adalah aspek penting dalam memastikan bahwa etika pemerintahan diterapkan secara konsisten dan efektif. Masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan umpan balik, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang mendorong pemerintahan untuk beroperasi secara lebih etis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

1. Pengertian Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan

Partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemberian masukan dalam proses perencanaan kebijakan, penyampaian keluhan atau aduan tentang praktik-praktik yang tidak etis, hingga ikut serta

dalam kegiatan pengawasan yang lebih formal seperti audit sosial dan pengawasan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat sipil.

Menurut Satria (2022), partisipasi publik dalam pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bisa saja tidak berjalan efektif, atau bahkan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan

Berikut adalah beberapa bentuk partisipasi publik yang dapat dilakukan dalam pengawasan pemerintahan:

a. Pengawasan Informal melalui Media Sosial dan Laporan Masyarakat

Media sosial telah menjadi platform yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah, serta melaporkan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip etika. Selain itu, laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya juga menjadi bentuk pengawasan informal yang sangat efektif dalam memastikan akuntabilitas pemerintah.

b. Keterlibatan dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan

Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan kebijakan publik melalui forum konsultasi publik atau musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah diterapkan dengan cara memberikan umpan balik yang konstruktif dan kritis.

c. Pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pengawasan pemerintahan. Mereka sering kali melakukan audit sosial atau memantau kebijakan tertentu yang berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. LSM juga dapat berperan dalam mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses pengawasan ini.

d. Partisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan Umum

Salah satu cara partisipasi publik yang paling fundamental adalah melalui pemilu atau pemilihan umum. Melalui hak pilih mereka, warga negara memilih pejabat publik yang dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat secara etis dan bertanggung jawab.

3. Tantangan dalam Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan

Meskipun partisipasi publik sangat penting dalam pengawasan pemerintahan, terdapat beberapa tantangan yang dapat menghalangi keterlibatan aktif masyarakat:

a. Kurangnya Akses Informasi

Salah satu kendala terbesar dalam partisipasi publik adalah terbatasnya akses informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua informasi terkait kebijakan dan tindakan pemerintah mudah diakses oleh masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik dalam pengawasan.

b. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah

Jika masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan berpengaruh pada keputusan pemerintah, mereka mungkin enggan untuk terlibat dalam pengawasan. Ketidakpercayaan ini bisa disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak responsif terhadap masukan masyarakat.

c. Hambatan Hukum dan Kebebasan Sipil

Di beberapa negara, meskipun ada sistem untuk mendukung partisipasi publik, masih terdapat hambatan hukum yang membatasi kebebasan sipil dan hak untuk mengkritik pemerintah. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan pelanggaran etika dalam pemerintahan.

4. Manfaat Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan

Partisipasi publik yang aktif dalam pengawasan pemerintahan memberikan berbagai manfaat bagi tata kelola pemerintahan, antara lain:

a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya pengawasan yang melibatkan masyarakat, pemerintah akan lebih terdorong untuk membuka informasi dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

b. Mengurangi Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Partisipasi publik membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat, yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintahan. Ketika masyarakat ikut mengawasi, penyalahgunaan kekuasaan akan lebih cepat terdeteksi.

c. Meningkatkan Kualitas Kebijakan

Umpan balik dari masyarakat dapat memberikan perspektif baru yang berguna dalam perbaikan kebijakan. Kebijakan yang dibuat dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih efektif dan lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat.

5. Contoh Praktik Partisipasi Publik yang Sukses

Salah satu contoh praktik partisipasi publik yang berhasil adalah program *Whistleblower* di beberapa negara seperti Amerika Serikat. Program ini memberi kesempatan kepada pegawai negeri dan masyarakat untuk melaporkan praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut akan pembalasan. Di Indonesia, program *Lapor!* (*Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat*) juga menjadi contoh positif di mana masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait masalah pelayanan publik dan tindakan tidak etis oleh aparat pemerintah secara langsung melalui platform digital.

Partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip etika yang telah ditetapkan. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam pengawasan langsung maupun dalam proses pengambilan kebijakan, pemerintah dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Partisipasi publik bukan hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk mengurangi korupsi dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BAB

7

STUDI KASUS ETIKA PEMERINTAHAN

A. Kasus Korupsi dalam Pemerintahan

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan di banyak negara di seluruh dunia. Korupsi merusak integritas lembaga pemerintahan, menciptakan ketidakadilan, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis beberapa kasus korupsi besar dalam pemerintahan yang telah terjadi, untuk memahami bagaimana korupsi dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegahnya di masa depan.

1. Pengertian Korupsi dalam Pemerintahan

Korupsi dalam pemerintahan merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang biasanya melibatkan penyyuapan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, atau penggelapan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi adalah tindakan yang tidak hanya merugikan negara dalam bentuk kerugian finansial, tetapi juga merusak prinsip-prinsip etika pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (KPK, 2021).

2. Beberapa Kasus Korupsi Besar dalam Pemerintahan

Berikut adalah beberapa contoh kasus korupsi besar yang mengguncang pemerintahan di berbagai negara:

a. Kasus Korupsi E-KTP (Indonesia, 2011–2017)

Kasus korupsi proyek e-KTP di Indonesia merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus ini melibatkan banyak pejabat tinggi, termasuk anggota DPR, pejabat kementerian, serta pengusaha. Dalam proyek ini, sejumlah uang negara yang besar, yang seharusnya digunakan untuk mengganti kartu identitas elektronik, diselewengkan melalui praktik suap dan mark-up anggaran. Total kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2,3 triliun (Fahmi, 2022). Kasus ini mencerminkan betapa besar dampak korupsi dalam sistem pemerintahan dan pentingnya pengawasan yang efektif dalam proyek besar.

b. Kasus 1MDB (Malaysia, 2009–2015)

Kasus korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad) di Malaysia melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk mantan Perdana Menteri Najib Razak. Dalam kasus ini, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Total kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari \$4,5 miliar. Kasus ini menjadi contoh bagaimana korupsi di tingkat tertinggi dapat merusak perekonomian negara dan merusak reputasi pemerintah di mata dunia internasional (Prabowo & Aziz, 2021).

c. Kasus Korupsi di FIFA (2015)

Meskipun bukan kasus korupsi yang terjadi dalam pemerintahan, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi FIFA ini menunjukkan bagaimana korupsi dalam organisasi internasional juga dapat merusak tata kelola dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat FIFA terlibat dalam suap dan penyuaipan untuk memperoleh hak siar dan

penyelenggaraan turnamen sepak bola. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dan berdampak pada banyak negara yang berpartisipasi dalam kegiatan FIFA (Santoso, 2020).

d. Kasus “Operation Car Wash” (Brasil, 2014–2018)

Kasus korupsi terbesar yang melibatkan perusahaan minyak negara Petrobras dan sejumlah pejabat pemerintah Brasil dikenal dengan nama "Operation Car Wash". Kasus ini mengungkapkan adanya praktek korupsi yang melibatkan suap antara perusahaan dan pejabat pemerintah untuk memenangkan kontrak-kontrak besar. Selain mengungkapkan kedalaman korupsi di sektor energi, kasus ini juga mengguncang pemerintahan Brasil dan menyebabkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, dijatuhi hukuman penjara (Sutrisno & Hadi, 2023).

3. Dampak Korupsi dalam Pemerintahan

Korupsi dalam pemerintahan memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi negara itu sendiri maupun masyarakat. Beberapa dampak utama korupsi adalah sebagai berikut:

a. Melemahnya Institusi Pemerintahan

Korupsi menyebabkan pemerintahan kehilangan integritasnya. Ketika pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan instabilitas politik dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

b. Ketidakadilan Sosial

Praktik korupsi seringkali mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan layanan publik. Misalnya, proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sering kali dibajak oleh oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi, yang berakibat pada

kualitas pelayanan publik yang rendah dan ketimpangan sosial yang semakin besar.

c. Kerugian Ekonomi

Korupsi juga menyebabkan kerugian besar dalam perekonomian negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atau kesejahteraan masyarakat malah dialihkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini memperburuk ketidakstabilan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

d. Penghambat Pembangunan

Korupsi menghambat pembangunan nasional karena menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi rakyat sering kali tertunda atau terbengkalai akibat praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak tertentu.

4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi

Dalam rangka menanggulangi dan mencegah korupsi, berbagai negara telah menerapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:

a. Pemberantasan melalui Lembaga Antikorupsi

Negara-negara seperti Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brasil dengan Operasi Car Wash, serta Malaysia dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi. Lembaga-lembaga ini bekerja untuk mengungkap kasus-kasus besar, melakukan penyelidikan, dan memberi sanksi terhadap pelaku korupsi.

b. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah harus memperkuat sistem transparansi dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan membangun platform digital untuk laporan publik dan mempermudah akses informasi terkait kebijakan dan pengelolaan anggaran.

c. Reformasi Hukum

Reforma hukum yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi menjadi langkah yang sangat penting untuk mencegah praktik korupsi di masa depan. Peraturan yang melarang pejabat publik untuk menerima hadiah atau suap dan pengawasan yang lebih ketat juga dapat meminimalkan potensi korupsi.

Korupsi dalam pemerintahan adalah masalah yang serius dan membutuhkan perhatian penuh dari semua pihak. Kasus-kasus korupsi besar yang terjadi dalam pemerintahan di berbagai negara menunjukkan betapa merusaknya dampak dari praktik ini. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus melibatkan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, serta lembaga-lembaga independen yang berkomitmen untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan.

B. Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan adalah salah satu bentuk pelanggaran etika yang sering ditemukan dalam sistem pemerintahan di seluruh dunia. Tindakan ini merusak integritas lembaga publik, merugikan masyarakat, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

1. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merujuk pada penggunaan kekuasaan atau otoritas oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu yang melanggar prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku. Tindakan ini terjadi ketika pejabat yang diberikan mandat oleh negara untuk melayani publik malah menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang tidak sah dan merugikan kepentingan umum.

Menurut **Kurniawan (2020)**, penyalahgunaan wewenang dapat beragam bentuknya, mulai dari pengalihan anggaran yang tidak sesuai tujuan, penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, hingga manipulasi kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Keberadaan sistem pengawasan yang lemah sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintahan.

2. Beberapa Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemerintahan

a. Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat di Indonesia (2019)

Pada tahun 2019, beberapa pejabat pemerintah di Indonesia terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada korupsi. Pejabat tersebut menggunakan kekuasaannya dalam pembuatan kebijakan untuk mempengaruhi hasil lelang proyek besar, mengalihkan anggaran, dan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi negara dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Herman & Yani, 2023).

b. Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberian Izin Usaha di Rusia (2020)

Di Rusia, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik terungkap melalui pemberian izin usaha kepada perusahaan yang dimiliki oleh kerabat dekat pejabat tersebut. Kasus ini memicu pengaruh negatif terhadap iklim bisnis di negara tersebut karena keputusan-keputusan yang diambil tidak didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi lebih pada hubungan pribadi dan nepotisme (Nugroho & Sari, 2022).

c. Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat di India (2018)

Di India, salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintahan terjadi ketika pejabat tinggi negara bagian menggunakan posisinya untuk memberikan kontrak-kontrak besar kepada perusahaan yang memiliki kedekatan pribadi dengannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemerintahan dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya negara (Rahmawati & Taufik, 2021).

3. Dampak Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemerintahan

Penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan:

a. Penurunan Kepercayaan Publik

Penyalahgunaan wewenang merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pejabat publik memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, masyarakat merasa tidak dilayani secara adil. Kepercayaan publik terhadap pemerintah pun menurun, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi pemerintahan tersebut.

b. Kerugian Ekonomi

Penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, misalnya melalui proyek-proyek yang disalahgunakan atau anggaran yang dibelanjakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini berimbas pada penurunan kualitas pelayanan publik dan menghambat pembangunan ekonomi negara.

c. Meningkatnya Praktik Korupsi

Penyalahgunaan wewenang sering kali berujung pada praktik korupsi, yang merusak sistem pemerintahan secara keseluruhan. Ketika pejabat publik tidak dikenakan sanksi atas penyalahgunaan wewenang, mereka cenderung melakukan tindakan serupa di masa

depan, yang memperburuk tingkat korupsi di dalam birokrasi.

4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan, beberapa langkah yang perlu diambil adalah:

a. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Sistem pengawasan yang transparan dan efektif dapat mencegah pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya. **Tanojo & Priyanto (2019)** menyarankan pembentukan badan pengawasan internal yang independen serta peningkatan transparansi dalam proses pembuatan keputusan agar publik dapat melihat dan mengevaluasi keputusan yang diambil oleh pejabat.

b. Pendidikan Etika dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah

Menurut **Kurniawan (2020)**, penting bagi aparat pemerintah untuk menerima pelatihan etika yang dapat memperkuat kesadaran mereka tentang kewajiban mereka dalam menjalankan tugasnya dengan integritas. Pendidikan etika ini harus terus-menerus diberikan agar pejabat publik selalu ingat akan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.

c. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Penegakan hukum yang tegas bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan wewenang adalah langkah kunci untuk mencegah hal ini terjadi. Penyalahgunaan wewenang harus dikenakan sanksi yang tegas, yang mencakup hukuman pidana dan tindakan administratif yang dapat merugikan karier pejabat tersebut.

Penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan adalah masalah serius yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Upaya pencegahan melalui penguatan sistem pengawasan, pendidikan etika bagi aparatur pemerintah, dan penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan

wewenang. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB 8

PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN ETIKA PEMERINTAHAN

A. Digitalisasi Pemerintahan dan Etika

Digitalisasi pemerintahan, yang sering disebut juga sebagai **e-government**, telah menjadi suatu langkah penting dalam modernisasi administrasi publik di banyak negara. Dalam era globalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal etika pemerintahan.

1. Pengertian Digitalisasi Pemerintahan

Digitalisasi pemerintahan adalah penggunaan teknologi digital, terutama internet, untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, serta efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah. Ini mencakup penerapan sistem informasi digital untuk proses administrasi, pengambilan keputusan, serta interaksi antara pemerintah dan warga negara. Digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Menurut **Tanojo & Priyanto (2019)**, digitalisasi membawa pemerintahan menuju suatu era di mana proses administrasi yang dulu rumit dan memakan waktu dapat dilakukan secara cepat dan transparan, sehingga meningkatkan layanan kepada masyarakat.

2. Dampak Positif Digitalisasi Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Digitalisasi pemerintahan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Beberapa dampaknya adalah:

a. **Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran dan Proyek Pemerintah**

Sistem digital memungkinkan data anggaran dan penggunaan dana negara untuk dipublikasikan secara online dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini memastikan bahwa setiap penggunaan dana negara dapat diawasi oleh publik, sehingga mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara. Misalnya, **platform e-budgeting** yang digunakan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia memberikan informasi yang terbuka mengenai alokasi dana dan realisasi anggaran.

b. **Akses Informasi Secara Real-Time**

Digitalisasi pemerintahan juga memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi terkait kebijakan dan program pemerintah secara real-time. Portal resmi yang diperbarui secara berkala memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat tentang program-program pemerintah. Hal ini juga mengurangi potensi disinformasi yang sering terjadi akibat ketidaktransparanan dalam pengelolaan data publik.

c. **Peningkatan Pengawasan dan Partisipasi Publik**

Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Misalnya, partisipasi publik dalam konsultasi publik secara online memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan langsung terkait kebijakan pemerintah. Hal ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena adanya pengawasan langsung dari warga negara. **Nugroho & Sari (2022)** menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam

digitalisasi pemerintahan sebagai langkah penguatan akuntabilitas.

d. Pelaporan Pelanggaran Secara Anonim

Sistem digital juga memungkinkan masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah secara anonim. Sistem pelaporan berbasis teknologi, seperti aplikasi whistleblowing, dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan tanpa takut akan pembalasan atau intimidasi.

3. Tantangan Etika dalam Digitalisasi Pemerintahan

Meskipun digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, proses ini juga membawa tantangan baru dalam hal etika pemerintahan, antara lain:

a. Privasi dan Keamanan Data

Dengan digitalisasi, data pribadi dan informasi sensitif terkait warga negara dan aktivitas pemerintah akan dikelola secara elektronik. Penting untuk memastikan bahwa data ini dilindungi dengan baik agar tidak disalahgunakan. Pelanggaran terhadap privasi data dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital. Sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**, negara harus menjamin perlindungan data pribadi warganya di era digital.

b. Kemungkinan Penyalahgunaan Teknologi untuk Keuntungan Pribadi

Penyalahgunaan teknologi informasi oleh aparat pemerintahan, seperti manipulasi data atau penggunaan sistem digital untuk keuntungan pribadi, tetap menjadi risiko yang harus diawasi. **Kurniawan (2020)** menyatakan bahwa penguatan sistem pengawasan terhadap implementasi e-government perlu dilakukan agar tidak terjadi penggelembungan data atau manipulasi informasi.

c. Kesenjangan Akses

Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ketimpangan digital atau **digital divide** bisa menjadi hambatan dalam penerapan e-government yang inklusif. **Rahmawati & Taufik (2021)** mengingatkan bahwa penting untuk memperhatikan kesetaraan akses terhadap teknologi agar semua kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sama dari digitalisasi pemerintahan.

4. Upaya Meningkatkan Etika dalam Digitalisasi Pemerintahan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan etika yang timbul dari digitalisasi pemerintahan, beberapa langkah dapat diambil:

a. Penguatan Sistem Keamanan Siber

Pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan informasi untuk melindungi data pribadi dan mencegah kebocoran data. Penerapan teknologi **blockchain** dalam pemerintahan bisa menjadi solusi untuk memastikan integritas data yang tidak dapat dimanipulasi.

b. Edukasi dan Pelatihan Etika Digital

Aparatur pemerintahan perlu diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai etika digital yang meliputi tanggung jawab atas pengelolaan data pribadi, penggunaan teknologi secara bijaksana, dan transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis digital.

c. Pembangunan Infrastruktur Digital yang Merata

Pembangunan infrastruktur digital yang merata di seluruh daerah harus menjadi prioritas agar tidak terjadi ketimpangan akses terhadap teknologi. Hal ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan memperkuat partisipasi publik.

Digitalisasi pemerintahan berpotensi untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membawa tantangan baru dalam hal etika, terutama terkait dengan privasi, penyalahgunaan teknologi, dan kesetaraan

akses. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang memastikan pengelolaan data yang aman dan akuntabel, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan digital. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

B. Pengawasan Berbasis Teknologi

Pengawasan terhadap aparatur pemerintahan merupakan salah satu aspek kunci untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Di era digital ini, teknologi informasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat deteksi pelanggaran, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Pengawasan berbasis teknologi, yang mencakup penggunaan berbagai aplikasi, platform digital, serta sistem informasi, telah mengubah cara pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan.

1. Pengertian Pengawasan Berbasis Teknologi

Pengawasan berbasis teknologi merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memantau, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Teknologi yang digunakan dalam pengawasan ini termasuk perangkat lunak (software), sistem monitoring online, dan aplikasi mobile yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan real-time.

Menurut **Tanojo & Priyanto (2019)**, pengawasan berbasis teknologi memberikan keunggulan dalam hal transparansi, karena semua proses pengawasan tercatat dalam sistem digital yang mudah diakses oleh berbagai pihak, baik oleh masyarakat, lembaga pengawas internal pemerintah, maupun lembaga eksternal yang bertugas memantau kinerja pemerintah.

2. Jenis Teknologi yang Digunakan dalam Pengawasan Pemerintahan

Beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk pengawasan terhadap aparatur pemerintahan antara lain:

a. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan (SIMAP)

Sistem ini digunakan untuk mengelola data kinerja aparat pemerintah dan memantau berbagai aspek administrasi pemerintahan. Dengan sistem ini, pejabat dapat melaporkan kinerja mereka secara elektronik dan masyarakat dapat mengakses data tersebut untuk memeriksa kemajuan atau hambatan dalam proyek-proyek pemerintah.

b. Aplikasi Pelaporan Masyarakat (Whistleblowing System)

Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan secara anonim. Contohnya, aplikasi seperti **Lapor!** di Indonesia memungkinkan warga negara untuk melaporkan masalah seperti korupsi, layanan publik yang buruk, atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini memperkuat pengawasan dari sisi masyarakat.

c. Sistem Pemantauan Kinerja Aparatur Pemerintah (E-Government Monitoring Systems)

Sistem berbasis teknologi ini memungkinkan pemantauan kinerja aparatur pemerintah secara otomatis dan real-time. Setiap aktivitas atau progres pekerjaan pemerintah tercatat dalam sistem yang dapat diakses oleh pengawas atau masyarakat untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Blockchain untuk Pengawasan Transaksi Keuangan Pemerintah

Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Semua transaksi yang dilakukan oleh pemerintah tercatat dalam blockchain yang bersifat transparan dan

tidak dapat dimanipulasi. Hal ini membantu mencegah korupsi dan kebocoran anggaran.

3. Dampak Positif Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Pemerintahan

Penggunaan teknologi dalam pengawasan aparatur pemerintahan membawa banyak manfaat, antara lain:

a. Peningkatan Transparansi

Dengan sistem digital yang dapat diakses oleh publik, transparansi meningkat karena semua proses dan keputusan pemerintah dapat dipantau secara terbuka. Proyek-proyek pemerintah yang menggunakan dana negara dapat dilihat oleh masyarakat, dan keputusan-keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

b. Akses Informasi yang Lebih Cepat dan Akurat

Teknologi memungkinkan pengawasan dilakukan secara real-time, sehingga pelanggaran atau ketidaksesuaian dapat segera dideteksi. Masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan dan keputusan pemerintah melalui berbagai platform digital.

c. Efisiensi dan Pengurangan Biaya

Pengawasan berbasis teknologi memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara otomatis dan lebih efisien, mengurangi beban kerja manual. Hal ini juga mengurangi biaya operasional yang sebelumnya dibutuhkan untuk proses pengawasan yang konvensional.

d. Pemberantasan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Teknologi membantu mempersempit ruang untuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah. Sistem yang transparan, misalnya dalam pengelolaan anggaran dan proyek, membuat setiap tindakan yang merugikan negara dapat terdeteksi lebih cepat.

4. Tantangan dalam Penerapan Pengawasan Berbasis Teknologi

Meskipun pengawasan berbasis teknologi memiliki banyak keunggulan, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan:

a. Ketergantungan pada Infrastruktur Digital yang Memadai

Keberhasilan pengawasan berbasis teknologi bergantung pada adanya infrastruktur digital yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. **Rahmawati & Taufik (2021)** menyatakan bahwa kesenjangan digital (digital divide) antara daerah yang memiliki akses teknologi tinggi dan yang kurang akses dapat menghambat efektivitas sistem pengawasan.

b. Keamanan dan Privasi Data

Salah satu risiko dari pengawasan berbasis teknologi adalah ancaman terhadap keamanan dan privasi data. Pemerintah harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan melalui sistem pengawasan digital dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

c. Resistensi terhadap Perubahan dari Aparatur Pemerintah

Tidak semua aparat pemerintah siap atau terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam menjalankan tugasnya. Beberapa mungkin merasa terancam oleh adanya sistem pengawasan yang lebih transparan dan terbuka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengedukasi aparatur pemerintahan tentang manfaat pengawasan berbasis teknologi dan bagaimana sistem ini akan membantu mereka dalam bekerja secara lebih efisien dan akuntabel.

5. Upaya Memperkuat Pengawasan Berbasis Teknologi

Untuk memaksimalkan potensi pengawasan berbasis teknologi, beberapa langkah dapat diambil:

a. Peningkatan Infrastruktur Digital

Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur digital yang mendukung pengawasan berbasis teknologi tersedia secara merata, termasuk di daerah-daerah yang kurang berkembang. Hal ini dapat dilakukan melalui program pembangunan infrastruktur TI yang lebih inklusif.

b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintahan harus diberikan pelatihan dan edukasi mengenai penggunaan teknologi dalam pengawasan. Pelatihan ini akan memastikan mereka memahami bagaimana memanfaatkan sistem digital untuk bekerja secara efisien dan menjaga akuntabilitas.

c. Penegakan Hukum dan Kebijakan yang Jelas

Kebijakan yang mendukung pengawasan berbasis teknologi harus diatur dalam regulasi yang jelas. Pemerintah juga harus menegakkan hukum secara tegas terhadap siapa pun yang mencoba memanipulasi atau merusak sistem pengawasan berbasis teknologi.

Pengawasan berbasis teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Dengan menggunakan berbagai sistem digital, pemerintah dapat memastikan bahwa aparatur pemerintahan bekerja dengan integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan infrastruktur, keamanan data, dan resistensi dari aparatur, dengan upaya yang tepat, pengawasan berbasis teknologi dapat mengurangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB

9

TANTANGAN DAN PERSPEKTIF ETIKA Pemerintahan ke Depan

A. Tantangan Membangun Etika Pemerintahan

Membangun dan menegakkan etika dalam pemerintahan adalah tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Etika pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aturan dan kebijakan formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan sosial yang harus diterapkan oleh aparatur negara dalam menjalankan tugas mereka. Tantangan dalam membangun etika pemerintahan muncul karena adanya ketidakseimbangan antara prinsip-prinsip moral yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi dalam menegakkan etika pemerintahan:

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang mengancam etika pemerintahan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan pribadi atau golongan merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Korupsi seringkali mengakar dalam sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut **Sutrisno (2019)**, korupsi dapat terjadi karena ketidakjelasan pengawasan, kurangnya transparansi, dan rendahnya nilai moral aparat pemerintah. Oleh karena itu, menegakkan etika pemerintahan yang bersih memerlukan upaya pemberantasan korupsi melalui kebijakan anti-korupsi yang lebih efektif, pengawasan yang lebih ketat, dan

pemberdayaan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan.

2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat dapat menghalangi terciptanya pemerintahan yang beretika. Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan kerja dapat memicu ketidakadilan dalam pemerintahan, di mana kelompok tertentu mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Kondisi ini mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan publik, tetapi lebih kepada kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi.

Sebagaimana diungkapkan oleh **Nugroho & Sari (2022)**, pemerintah harus mengatasi ketimpangan sosial dengan menciptakan kebijakan yang inklusif, yang memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang terpinggirkan dan meminimalkan kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.

3. Ketidaktransparanan dalam Pengambilan Keputusan

Ketidakttransparanan dalam pengambilan keputusan pemerintahan mengarah pada rendahnya tingkat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Ketika keputusan pemerintah dibuat tanpa melibatkan masyarakat atau tanpa memberikan informasi yang cukup, publik akan merasa bahwa keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan segelintir orang dan bukan untuk kepentingan umum. Ketidakjelasan ini memunculkan spekulasi dan kecurigaan terhadap integritas pemerintah.

Tanojo & Priyanto (2019) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi ketidaktransparanan adalah dengan mengimplementasikan sistem pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi, di mana informasi terkait kebijakan, anggaran, dan proses pengambilan keputusan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.

4. Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas

Meskipun banyak negara memiliki peraturan yang ketat mengenai etika pemerintahan, sering kali penerapan peraturan tersebut tidak konsisten atau lemah. Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika, seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi, membuat etika pemerintahan hanya menjadi aturan yang bersifat normatif tanpa implementasi yang nyata. Penegakan hukum yang tidak adil atau tidak merata juga memperburuk kondisi ini.

Kurniawan (2020) menekankan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang beretika, dibutuhkan lembaga pengawas yang kuat dan independen yang dapat menegakkan hukum dengan tegas tanpa pandang bulu.

5. Resistensi terhadap Perubahan dalam Aparatur Pemerintahan

Salah satu tantangan besar dalam membangun etika pemerintahan adalah resistensi terhadap perubahan di dalam tubuh aparatur pemerintah. Banyak aparatur yang sudah terbiasa dengan cara kerja yang tidak etis atau dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sering kali disebabkan oleh budaya birokrasi yang sudah mengakar, di mana loyalitas terhadap kelompok tertentu lebih diutamakan daripada integritas dan etika profesi.

Menurut **Rahmawati & Taufik (2021)**, upaya untuk membangun etika pemerintahan harus diawali dengan perubahan budaya birokrasi yang mengutamakan integritas, profesionalisme, dan transparansi. Pelatihan dan pendidikan etika yang berkelanjutan bagi aparatur pemerintahan menjadi kunci untuk menciptakan perubahan tersebut.

6. Ketergantungan pada Sistem yang Rentan terhadap Penyalahgunaan

Sistem pemerintahan yang kompleks dan tumpang tindih, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif, sering kali menjadi ruang untuk penyalahgunaan wewenang.

Tanpa adanya sistem yang jelas dan terintegrasi, aparat pemerintah dapat memanipulasi sistem untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Sutrisno (2019) menyatakan bahwa teknologi dan sistem informasi berbasis digital dapat memainkan peran penting dalam memperbaiki sistem pengawasan pemerintah. Penggunaan e-government dan aplikasi pengawasan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan sistem pemerintahan.

7. Rendahnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah. Meskipun masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah, keterlibatan mereka dalam proses pengawasan seringkali terbatas. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran politik, kurangnya akses informasi, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah sering menjadi penghalang utama.

Nugroho & Sari (2022) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Dengan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga etika pemerintahan dan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

8. Penurunan Nilai-Nilai Moral dalam Masyarakat

Penurunan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku aparatur pemerintahan. Ketika norma sosial yang berlaku di masyarakat tidak mendukung integritas dan kejujuran, maka aparat pemerintah yang berasal dari masyarakat tersebut mungkin tidak merasa terdorong untuk bertindak dengan etika yang tinggi. Oleh karena itu, membangun budaya etika dalam pemerintahan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri.

Kurniawan (2020) berpendapat bahwa untuk membangun etika pemerintahan yang kuat, diperlukan upaya untuk memperbaiki nilai-nilai moral dalam masyarakat, termasuk melalui pendidikan dan penyuluhan yang terus menerus.

Menegakkan etika pemerintahan menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi melalui pendekatan yang komprehensif. Dari pemberantasan korupsi, penguatan transparansi, hingga perubahan budaya birokrasi, semua aspek ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Implementasi kebijakan yang mendukung etika pemerintahan, ditambah dengan pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan akuntabel.

B. Masa Depan Etika Pemerintahan

Masa depan etika pemerintahan menjadi topik penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Etika pemerintahan bukan hanya soal kepatuhan terhadap peraturan atau kode etik, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang melandasi setiap tindakan aparatur negara. Untuk itu, pengembangan etika dalam pemerintahan perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan perubahan zaman, tantangan baru, dan dinamika sosial yang terjadi. Berikut adalah beberapa harapan dan arah pengembangan etika pemerintahan untuk masa depan:

1. Meningkatkan Integritas Aparatur Pemerintah

Salah satu tujuan utama dari pengembangan etika pemerintahan adalah meningkatkan integritas aparatur pemerintahan. Aparatur yang memiliki integritas yang tinggi akan mampu membuat keputusan yang adil dan objektif, serta menghindari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, di masa depan, perlu ada program pelatihan yang berkelanjutan mengenai etika

bagi aparaturnya pemerintah di semua tingkat, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah.

Tanojo & Priyanto (2019) berpendapat bahwa pembekalan etika yang terintegrasi dalam pendidikan dan pelatihan aparat sipil negara akan sangat membantu dalam memperkuat integritas dan profesionalisme mereka. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran etika yang merusak kredibilitas pemerintah.

2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Di masa depan, salah satu harapan besar adalah penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintahan. Sistem pengawasan yang berbasis digital dan terintegrasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah.

Sutrisno (2019) menekankan pentingnya pengembangan teknologi yang memungkinkan adanya sistem pengawasan yang lebih transparan dan dapat diakses oleh publik. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat lebih cepat terdeteksi dan diperbaiki.

3. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang beretika. Oleh karena itu, pengembangan etika pemerintahan di masa depan juga harus mengarah pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tanpa melibatkan masyarakat dapat menurunkan kredibilitas pemerintah, sementara keputusan yang melibatkan publik akan lebih mudah diterima dan dihargai.

Nugroho & Sari (2022) menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan dialog terbuka dan forum konsultasi dengan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil lebih

mencerminkan aspirasi dan kepentingan umum. Dengan demikian, pemerintahan dapat lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Membangun Budaya Etika dalam Birokrasi

Perubahan budaya birokrasi menjadi salah satu langkah penting dalam membangun etika pemerintahan yang kuat. Birokrasi yang birokratis dan kaku sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang beretika. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk membangun budaya birokrasi yang lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab.

Kurniawan (2020) berpendapat bahwa pembangunan budaya etika dalam birokrasi harus dimulai dengan perubahan pola pikir aparatur pemerintahan, yang tidak hanya mengutamakan prosedur, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kepentingan publik dalam setiap keputusan yang diambil.

5. Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Etika Pemerintahan

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pengembangan etika pemerintahan di masa depan juga harus melibatkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan e-government dan sistem informasi yang terbuka akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah.

Rahmawati & Taufik (2021) menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam pemerintahan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan bersih. Selain itu, penggunaan teknologi juga mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan umpan balik terkait kebijakan pemerintah.

6. Mendorong Kolaborasi Internasional dalam Etika Pemerintahan

Di era globalisasi ini, pengembangan etika pemerintahan tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga harus melibatkan kolaborasi internasional. Negara-negara di dunia perlu bekerja sama dalam menangani tantangan global yang terkait dengan etika pemerintahan, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tanojo & Priyanto (2019) menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional dalam rangka mengembangkan standar etika pemerintahan yang lebih baik. Negara-negara dapat berbagi praktik terbaik dan saling mendukung dalam upaya menciptakan pemerintahan yang beretika dan akuntabel.

7. Menanggulangi Politisasi Pemerintahan

Politisasi pemerintahan, yaitu penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok, menjadi salah satu tantangan dalam menegakkan etika pemerintahan. Ke depan, harapan besar adalah terwujudnya pemerintahan yang bebas dari politisasi, di mana setiap keputusan dibuat berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan publik, bukan berdasarkan kepentingan politik tertentu.

Sutrisno (2019) mengusulkan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi politisasi pemerintahan adalah dengan memperkuat independensi lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga pengawas dan penegak hukum.

Pengembangan etika pemerintahan di masa depan harus mengarah pada penciptaan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatkan integritas aparatur pemerintahan, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan partisipasi publik, dan memanfaatkan teknologi, diharapkan etika pemerintahan dapat semakin ditegakkan. Semua elemen ini perlu saling mendukung untuk mewujudkan

pemerintahan yang dapat dipercaya dan mendukung kemajuan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, E. & Ardiansyah, F. (2021). *Pengawasan Pemerintahan dan Etika: Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan*. Semarang: Penerbit Karya.
- Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Pengawasan Pemerintahan yang Terintegrasi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kurniawan, R. (2022). *Transparansi dalam Pemerintahan: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Mandala.
- Kurniawati, L. (2020). *Etika Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Mahmudi, M. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Efisien*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Martono, P. & Yuliana, M. (2021). *Membangun Integritas dalam Birokrasi: Strategi Pemberantasan Korupsi dan Kolusi*. Surabaya: Penerbit Akademika.
- Mulyono, A. (2022). *Keputusan Pemerintah yang Beretika: Keberpihakan terhadap Kepentingan Publik*. Surabaya: Penerbit Ilmu.
- Nugroho, A. & Sari, M. (2022). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemerintahan: Faktor dan Solusi*. Surabaya: Penerbit Cendekia.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Anti-Korupsi untuk Aparatur Pemerintahan. Jakarta: KPK.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Etika PNS dalam Menyampaikan Informasi kepada Publik. Jakarta: Kementerian PAN-RB

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prabowo, R. (2020). *Pengelolaan Anggaran Negara yang Etis dan Transparan*. Bandung: Penerbit Mandala.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020). *Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah di Era Digital*. Jakarta: Kementerian PAN-RB.
- Rivai, V. & Sagala, S. (2022). *Manajemen Pemerintahan yang Efektif dan Etis*. Medan: Penerbit Bina Mulia.
- Sukrisno, W. (2022). *Peran Etika dalam Mengatasi Nepotisme dan Kolusi dalam Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Bintang.
- Sutrisno, S. (2020). *Etika dalam Hubungan Internasional dan Pemerintahan Global*. Jakarta: Penerbit Pelita.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Widodo, R. (2023). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Global*. Jakarta: Penerbit Nusantara.

TENTANG PENULIS

Salman, S.Sos., M.AP lahir pada 31 Desember 1990. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai pendidikan dasar di SD Negeri 128 Bontokunyi Era Baru melanjutkan ke SMP Negeri 5 Mannanti, dan menyelesaikan pendidikan menengah di Aliyah Al-Azhar Mannanti. Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S1) diperoleh dari STISIP Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2015, dan gelar Magister Administrasi Publik (S2) diraih di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Pada tanggal 5 Agustus 2016, Salman menikah dengan Sitti Lisma Armi, S.Pd., dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak, yaitu: Muh. Hafidz Alghidfary Salma, Ahmad Qiyas Muwaffaq Salman, Ahmad Athar Rayyan Salman Selain aktif sebagai dosen, Salman juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di bidang organisasi, beliau saat ini mengemban amanah sebagai Bendahara Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sinjai

Abd. Wahid, S.Sos., M.AP, Lahir pada 10 Maret 1988. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai pendidikan dasar di SD Negeri 25 Borong Uttie Desa Saukang Sinjai Timur melanjutkan ke SMP Negeri 04 Sinjai Timur, dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 01 Tondong Sinjai Timur. Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S1) diperoleh dari STISIP Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2015, dan gelar Magister Administrasi Publik (S2) diraih di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Pada tanggal 02 April 2018, Wahid menikah dengan Hasdinawati, S.Sos., M.Si. dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak, yaitu Zakiyah Najiyah. Selain aktif sebagai dosen, Wahid juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Sinjai dan menjadi Anggota Gugus Tugas Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) Periode 2024-2027 dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia. Di bidang organisasi, beliau saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sinjai Periode 2024-2028.